

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KUATKAN KEPATUHAN,
KORUPSI DILAWAN



Pemberantasan korupsi ditangkal sedini mungkin melalui peran pengawasan intern di Kementerian Keuangan. Peran unit pengendalian internal menjadi krusial untuk mengawasi dan antisipatif melakukan upaya pencegahan sedari awal.

Daftar Isi



COVER STORY:

Peran Itjen dan unit kepatuhan internal sebagai pengawas sekaligus sebagai penjaga dalam setiap fungsi di Kemenkeu menjadi penting untuk menangkal korupsi. Peran ini kami ibaratkan dengan wasit yang bertugas mengawasi sekaligus memberi peringatan sebelum pelanggaran terjadi.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Foto Cover:

Anas Nur Huda

- 5 **DARI LAPANGAN BANTENG**
- 6 **EKSPOSUR**

LAPORAN UTAMA

- 8 Bersinergi Cegah dan Berantas Korupsi
- 12 Pengawasan Harus Lebih di Depan
- 16 Infografik
- 18 Wajah Integritas dalam Pelayanan
- 20 Piawai Melindungi Institusi

PHOTO STORY

- 22 Cerita Kpi

TEKA TEKI

- 24 Teka Teki Medkeu

WAWANCARA

- 25 Gaya Baru Mengunjungi Museum

POTRET KANTOR

- 28 Di Bawah Kendali Srikandi

BAGAIMANA CARANYA?

- 31 Prosedur Permohonan Informasi PPID

PROFESI

- 32 Inspirasi Sang Dokter Inspiratif

BUKU

- 35 Menelusik Resep Ruang Kelas di Finlandia

Opini

- 36 Peran Integritas Organisasi Dalam Mendukung Integritas Individu

Uang Kita Buat Apa

- 38 Covid 19 dan UMKM

Opini

- 40 Rapid Test Laporan Keuangan Pemerintah

Generasi Emas

- 42 Mengubah Sampah menjadi Berkah

Lokal

- 44 Luluh Karena Pesona Menyeluruh Suku

Finansial

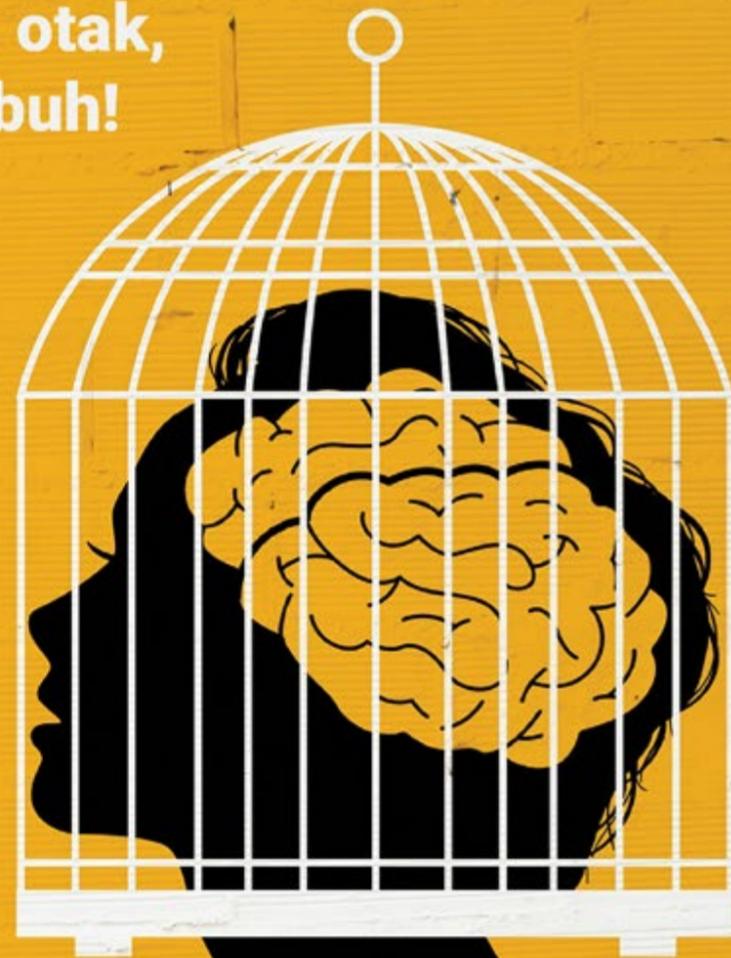
- 46 Evaluasi Resolusi Keuangan

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Suroho, Budi Prayitno, Budi Sulisty. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I., Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmajaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

JERAT NARKOBA

langsung menyerang otak,
tak ada jaminan sembuh!



Negeri Bebas Korupsi, Sebuah Utopia?

Frans Magnis Suseno dalam sebuah forum konvensi antikorupsi pernah berujar bahwa ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia tidak terdapat pada tindakan ekstremisme maupun terorisme. Budayawan dan rohaniawan tersebut justru menilai perilaku korupsi adalah ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia.

Hampir semua pihak mafhum bahwa korupsi adalah musuh bersama. Di Indonesia sendiri, perilaku korupsi sudah dimulai dari zaman kerajaan. Isu korupsi mulai dikaitkan dengan isu ekonomi sejak era Adam Smith dan mulai menjadi perhatian di bidang ini setelah jurnal Susan Rose-Ackerman berjudul "The Economics of Corruption" dimuat di tahun 1975*. Sejak itu, akademisi dan para pengambil kebijakan mulai berpikir bahwa korupsi adalah satu alasan utama mengapa negara-negara berkembang menderita ketertinggalan.

Indonesia sebagai negara yang

memiliki cita-cita mewujudkan Indonesia Maju di 2045 tentu menaruh perhatian besar untuk memerangi korupsi, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Peran strategis Kemenkeu sebagai institusi pengelola keuangan negara menjadikan upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi menjadi agenda penting yang tak pernah putus dijalankan. Kemenkeu melalui Inspektorat Jenderal memiliki fokus untuk membangun struktur pengendalian internal, melakukan perbaikan, menjaga *governance*, *risk*, dan kontrol dalam upaya mencapai budaya antikorupsi.

Meski perang melawan korupsi sudah digaungkan sejak berpuluh-puluh tahun lalu, perkara ini masih menjadi perkara bangsa yang belum tuntas diatasi. Sama dengan virus influenza yang memiliki beribu-ribu *strain*/jenis yang terus berkembang, korupsi juga memiliki berbagai macam modus seiring perkembangan zaman dan teknologi. Menghilangkan kasus korupsi sampai

ke titik nol jelas menjadi upaya yang tak mudah. Selain karena dari sisi upaya pencegahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ikhtiar ini memerlukan perubahan budaya komunitas.

Lalu, apakah impian agar Indonesia menjadi "bersih" hanya akan menjadi slogan dan utopia? Yang jelas, meski belum bisa mewujudkan kasus menjadi nol, korupsi dapat digiring menjadi level optimal. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di semua lini akan dapat terus dilakukan hingga kerugian yang ditanggung akibat per unit kasus sama dengan biaya pemberantasannya. Inilah titik optimal yang sangat mungkin dicapai. Pembaca dapat mencari tahu sudah sejauh mana pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kemenkeu hanya di edisi ini! Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia!

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Majalah Media Keuangan
@majalahmediakeuangan

Dari empat contoh upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang telah dilakukan Kemenkeu di bawah ini, mana yang perlu ditingkatkan.

A. Membangun struktur pengendalian internal dengan cara mewujudkan role model pimpinan yang

berintegritas /jujur
B. Mengefektifkan peranan unit kepatuhan internal
C. Melakukan penilaian integritas secara rutin
D. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan melalui pendekatan preventif (edukasi) dan pendekatan detektif

(penegakan kode etik dan penindakan perilaku fraud)

@erniattasinurat:

D. Bagi pihak yang korupsi harus mengembalikan kerugian negara plus denda

@selfy_goetha:

Pilihan saya D. Paling efektif bila kota melakukan kegiatan preventif sebelum terjadinya fraud

@marbun.filsuf:

D/ karena paling konkret.



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



majalahmediakeuangan



Cekal Barang Ilegal

Foto Dovan Wida Perwira | Teks Resha Aditya Pratama

Bea Cukai Banten bersama dengan Kejaksaan Tinggi Banten melaksanakan pemusnahan barang milik negara (BMN) dan barang bukti hasil penindakan kepabeanan dan cukai tahun 2020 di Pelabuhan Merak, Banten pada Rabu (4/11). Adapun BMN yang dimusnahkan sesuai keputusan Menteri Keuangan dan persetujuan DJKN meliputi lebih dari 12 juta batang rokok ilegal; 255 bungkus tembakau iris; 152 karton tembakau molasses; 1.256 botol minuman beralkohol; 4.920 liter minuman beralkohol tradisional; dan 996 pak barang campuran. Perkiraan nilai barang tersebut mencapai kurang lebih Rp13,8 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8,2 miliar.



BERSINERGI CEGAH DAN BERANTAS KORUPSI

Teks Dara Haspramudilla

Dari tahun ke tahun, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Indonesia membaik. Pada 2020, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40. Indonesia pun menempati posisi 85 dari 180 negara. Peningkatan ini pun tak lepas dari perjuangan bersama antara institusi pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat sipil. Begitu pula dengan Kementerian Keuangan. Berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan terus dilakukan agar perannya selaku punggawa keuangan negara lebih transparan dan akuntabel.

Sinergi antar institusi pemerintah dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Foto
Dok. Media
Keuangan

Dari sisi internal, penguatan sumber daya manusia dan sistem pengawasan, penggunaan teknologi informasi serta edukasi dan asistensi teknis kepada para pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan terus digalakkan. Dari sisi eksternal, komitmen sinergi pun dieratkan dengan beberapa lembaga negara penegak hukum seperti Bareskrim Polri dan KPK untuk mencegah aksi tindak pidana korupsi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) mengemban amanah dalam menjaga Kementerian Keuangan dalam dua aspek. Pertama, menjaga Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran BA015. Aspek ini ada di lingkup internal Kementerian Keuangan dan cenderung lebih mudah untuk dikontrol.

“Untuk belanja di Kementerian Keuangan itu relatively sudah jauh lebih bagus, efisiensi, efektivitas, *compliance* itu bagus karena memang kita sudah mengawal bahkan sejak perencanaan,” terang Sumiyati, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Tugas kedua, menjaga fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam peran kedua ini, Itjen Kemenkeu bersinergi dengan beberapa lembaga penegak hukum. Sinergi ini membantu Itjen Kemenkeu dalam menjangkau kuasa pengguna anggaran yang tersebar baik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah bahkan BUMN dan BUMD.

“Kami tidak punya tangan untuk bisa menjangkau ke semua. Oleh karena itu, kami membangun kerja sama baik dengan kementerian/lembaga selaku kuasa pengguna anggaran maupun dengan aparat penegak hukum seperti KPK, Bareskrim, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung,” terang Sumiyati.

Teguh berkomitmen untuk cegah korupsi

Komitmen Kemenkeu dalam

memberantas korupsi melalui beragam upaya strategis pun diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini disampaikan oleh Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Firli, langkah yang paling signifikan adalah perbaikan remunerasi sebagai titik awal reformasi birokrasi dalam rangka mencegah korupsi secara struktural serta pembentukan unit kerja

“Modernisasi sistem yang dilakukan saat ini secara struktural juga memperkuat basis pemungutan dengan penggunaan teknologi yang juga merupakan upaya pencegahan yang sistematis”



Firli Bahuri
Ketua KPK

pengawasan di tingkat kementerian dan direktorat jenderal terutama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.

“Upaya sistematis ini kemudian didukung dengan perbaikan tata kelola organisasi dan tata kerja yang mengadopsi sistem manajemen modern, sehingga dapat terlihat dari banyak penghargaan yang terkait dengan reformasi birokrasi yang diperoleh oleh Kementerian Keuangan,” tambah Firli.

Kerja bersama tebas korupsi

Ada beberapa program sinergi yang kami jalankan bersama Kemenkeu, tetapi yang paling menonjol adalah upaya perbaikan sistem melalui kajian sistem dengan beberapa rekomendasi perbaikan.

“Beberapa program yang pernah dilakukan antara lain di Ditjen Bea dan Cukai yakni perbaikan mekanisme impor dengan resiko tinggi dan perbaikan sistem pemberian fasilitas bebas cukai rokok untuk kawasan FTZ. Di Ditjen Pajak, juga dilakukan kajian perbaikan sistem pengelolaan keberatan wajib pajak atas surat keputusan kurang bayar,” terang Firli.

Tidak hanya itu, sinergi lain yang dilakukan berupa kerja sama dalam kerangka penindakan berupa tukar menukar informasi dan upaya penegakan hukum yang berlangsung secara berkelanjutan.

“Ada program terkait pencegahan bagi kepala daerah dalam konteks transfer keuangan daerah dan dana desa, pemberian dana insentif daerah mulai tahun anggaran 2021 bagi pemda yang memenuhi kriteria berdasarkan usulan Kedeputan Pencegahan KPK. Lalu, koordinasi untuk pelaporan gratifikasi yang dilaporkan ke KPK dan memerlukan tindak lanjut dari Inspektorat Jenderal,” tambahnya.

Tantangan di lapangan

Usaha dalam mencegah dan memberantas korupsi bukanlah tanpa aral melintang. Tantangan kerap hadir ketika perbaikan sistem melibatkan pemangku kepentingan. Itulah pentingnya memegang teguh komitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi dari jajaran pimpinan dan juga *stakeholders* Kemenkeu.

“Hambatan dalam sinergi pemberantasan korupsi terjadi ketika perbaikan sistem melibatkan *stakeholders* atau pihak lain di luar KPK dan Kementerian Keuangan, misalnya pihak swasta, pemerintah daerah



Sebagai pemegang mandat pengumpulan penerimaan negara, perbaikan sistem penerimaan diperlukan agar penerimaan negara lebih optimal.

Foto
Dok. Media
Keuangan

provinsi dan kabupaten, kementerian dan lembaga lainnya termasuk instansi penegak hukum. Pada titik ini hambatan kadang terjadi ketika komitmen tidak cukup kuat untuk direalisasikan di lapangan,” jelas Firli

Tak hanya itu, tantangan juga muncul dari regulasi yang seringkali membatasi transformasi ke arah yang lebih baik.

“Desentralisasi kewenangan hingga regulasi sektoral yang melekat pada masing masing *stakeholders* terkadang menghambat upaya perbaikan sistem di masing masing direktorat jenderal,” tambahnya.

Sumiyati menambahkan tantangan mungkin terasa di awal merintis kerja sama. Namun demikian, prosesnya semakin membaik dikarenakan komitmen bersama dari pimpinan hingga ke bawah menguat.

“Jadi mungkin di awal. Kebetulan pada saat awal merintis kerjasama itu sudah dilakukan oleh para Irjen sebelumnya ya. Saya yakin di tahap awal itu tentunya bukan suatu hal yang mudah, tapi sampai adanya suatu MoU atau perjanjian kerjasama yang ditangani, maka di sini sejak di tingkat *high level* ini pasti sudah ada komitmen

bersama sehingga ke bawah itu kita jalan. Alhamdulillah pada saat ini ini benar-benar kerjasama itu semakin baik dan semakin intensif,” tuturnya.

Harapan perbaikan ke depan

Kemenkeu memiliki peran strategis dan kontribusi yang signifikan dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia. KPK berharap Kemenkeu dapat terus meningkatkan performa sistem agar lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat mencegah korupsi secara sistematis.

“Sistem penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan, sistem pembayaran, sistem pelaporan dari desa hingga nasional dan Transfer Keuangan daerah dan dana desa yang senantiasa diperbaiki dan mengadopsi teknologi akan memberi kepastian sekaligus menutup peluang oknum memanfaatkan sistem ini untuk kepentingannya,” tutur Firli.

Sebagai pemegang mandat pengumpulan penerimaan negara, perbaikan sistem penerimaan sebagai hasil sinergi Kemenkeu dan KPK juga diperlukan agar penerimaan negara lebih optimal.

“Modernisasi sistem yang dilakukan saat ini secara struktural juga memperkuat basis pemungutan dengan penggunaan teknologi yang juga merupakan upaya pencegahan yang sistematis,” tambah Firli.

Perbaikan sistem menjadi bagian dari rencana strategis Itjen Kemenkeu yang diharapkan dapat menjadi *trusted advisor*. Pengembangan sistem informasi berbasis IT di semua unit eselon 1 menjadi keniscayaan agar peran Itjen Kemenkeu untuk mengawal secara *end-to-end* dapat terealisasi dengan baik.

“Ada beberapa aspek yang kita kawal termasuk sistemnya. Jadi dari sisi tata kelolanya seperti apa, dari sisi keamanannya seperti apa, kemudian dari sisi operasinya. Kemudian, melihat pemanfaatan dan pengolahan data di eselon 1 seperti apa. Apalagi memasuki industri 4.0. Dalam *embracing emerging* teknologi ini, kami sudah siapkan dari dua tahun lalu yakni memantapkan audit manajemen sistem *full* berbasis IT dan melatih SDM kita dari level operator, manajerial, hingga eksekutif,” papar Sumiyati

PENGAWASAN HARUS LEBIH DI DEPAN

Teks Reni Saptati D.I

Sebagai unit pengawas intern, Inspektorat Jenderal (Itjen) menjadi *early adopter* penggunaan teknologi informasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka bergerak lebih cepat dibanding unit lain. Bagaimanapun, pengawas harus lebih progresif daripada yang diawasi. Apalagi, pemanfaatan teknologi informasi di Kemenkeu sangat masif. Itjen selalu bergegas, agar tetap bisa selangkah di depan.

“**K**ami harus mengikuti dan harus memanfaatkan semua

kemungkinan yang bisa diberikan oleh teknologi informasi,” tegas Inspektur VII Kemenkeu Alexander Zulkarnain. Itjen melakukan digitalisasi secara menyeluruh. Pada aspek manajemen pengawasan, Itjen memanfaatkan *Audit Management System* (AMS), khususnya *assurance*, termasuk dalam interaksi dengan klien pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

“AMS ini adalah *backbone*-nya,” jelas Alexander. “Di sana sudah terekam semua kerja kami, baik akuntabilitasnya maupun kualitasnya. Jadi kerja kami semakin akuntabel,” ia menambahkan. Proses digitalisasi ini sudah berlangsung sejak lama. AMS sendiri sudah digunakan oleh auditor Itjen sejak tujuh tahun lalu.

Inisiatif lain yang lahir di Itjen yakni penggunaan *data analytics* sebagai salah satu pendekatan kegiatan pengawasan, terutama atas pengelolaan teknologi informasi di unit-unit Kemenkeu. Sementara itu, dalam hal manajemen organisasi, digitalisasi proses bisnis telah diterapkan sejak lama, seiring dengan digitalisasi yang dilaksanakan di Kemenkeu.

“Kami juga sedang menyusun *roadmap* penggunaan *emerging technology*,” ungkap pria yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur III tersebut. Kombinasi dan integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada dan identifikasi teknologi terbaru untuk pengawasan terus dilakukan supaya Itjen makin optimal dalam menjaga pengelolaan keuangan negara.

Saat ini, Itjen tengah mengembangkan *predictive analytic and prescriptive analytic*, sehingga nantinya bisa memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan memperkirakan *outcome* dari suatu kebijakan. “Ini masih embrio, tapi kita sedang melangkah ke sana.

Inilah langkah-langkah Itjen menghadapi transformasi teknologi,” jelas Alexander.

Tantangan era pandemi

Alexander mengakui, pemanfaatan teknologi informasi yang telah lama berlangsung di Itjen membuat mereka tak gagap menghadapi pandemi. “Kalau dari sisi teknologi, kita tidak terlalu terkejut. Yang terkejut mungkin sisi psikologisnya,” terangnya. Oleh sebab itu, ada pelayanan psikologi untuk para pegawai Itjen. Stres akibat pandemi ia sebut dapat mempengaruhi performa saat bekerja.

Tantangan lain muncul dalam pengawasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai kebijakan yang bersifat *extraordinary*, perumusan program ini dilakukan dengan sangat cepat. “Kami harus menjaga keseimbangan antara kecepatan perumusan kebijakan dengan akuntabilitas. Itu seperti meniti di atas tali,” ujar Alexander.

Implementasi program PEN menghendaki eksekusi belanja harus dilakukan cepat, tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel. “Kami jaga supaya tidak ada *moral hazard*,” tegas Alexander. Isu ini menjadi tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program PEN. Tak hanya Kemenkeu, tetapi juga kementerian/ lembaga (KL) lain dan seluruh pemerintah daerah.

“Kemudian, dari sisi pertanggungjawaban, ini jelas menyangkut jumlah yang tidak sedikit, ratusan triliun. Belanjanya juga tak terduga, *unprecedented*, dari perumusan kebijakan sampai realisasi. Nah, perlu diperhatikan bagaimana akuntabilitasnya, pencatatannya, dan penggolongannya,” katanya.

Itjen berusaha memastikan seluruh transaksi dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan, serta memastikan tidak ada pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaannya. Tak hanya itu, mereka juga menjalin kerja sama dengan Aparat

UKI dibentuk di tiap eselon I untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja organisasi dan mendeteksi indikator terjadinya *fraud* sejak awal.

Foto
Dok. Biro KLI

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KL lain, bahkan juga auditor intern perbankan. “Program PEN ini *multi channel, multi output*, dan *multi content*. Kami semua harus bisa berkoordinasi,” tutur Alexander.

Penguatan UKI

Unit kerja Kemenkeu tersebar hingga seluruh pelosok Indonesia. Untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja organisasi, Unit Kepatuhan Internal (UKI) dibentuk sebagai menjadi lini pengawasan kedua setelah Itjen. Harapannya, UKI dapat mendeteksi indikator terjadinya *fraud* sejak awal.

“Namun, struktur UKI sekarang masih belum ideal. Seharusnya UKI merupakan sebuah unit *dedicated*, tersendiri, yang bertugas untuk melakukan pemantauan atau implementasi pengendalian intern,” jelas Alexander. UKI di Kemenkeu juga masih belum memenuhi dari sisi jumlah dan kompetensi pegawai yang memadai. Sekitar 150 formasi jabatan pada UKI belum terisi dan lebih dari 50 persen pegawai pada UKI belum mendapatkan pelatihan tentang pemantauan pengendalian intern.

Ia menuturkan, UKI sering dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerapan pengendalian intern. Hal ini keliru, sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian intern harus diimplementasikan oleh seluruh pimpinan dan pegawai.

Meski masih memiliki kelemahan baik di proses maupun struktur, tetapi *outcome* yang dirasakan dari keberadaan UKI cukup banyak. “Dengan adanya UKI, unit-unit kerja menjalankan proses bisnis secara lebih berkualitas. UKI menjadi *self healing*, kantor bisa menyembuhkan dirinya sendiri,” ucap Alexander. “Pegawai merasa dirinya dipantau sehingga menjadi terhalangi untuk melakukan *fraud*, dampaknya pelayanan masyarakat menjadi terstandar, dan masyarakat pun puas,” tambahnya.

Agar UKI makin kuat, sejumlah terobosan dilakukan. Sejak tahun 2019 dibentuk Tim Pembina UKI di Itjen yang

bertugas untuk memberikan pembinaan kepada seluruh UKI di lingkungan Kemenkeu. UKI juga dilengkapi dengan sebuah perangkat panduan untuk mendeteksi indikator terjadinya *fraud*, yakni *Fraud Risk Scenario (FRS)*.

Memasuki tahun 2020, kegiatan pelatihan pengendalian intern dimasukkan dalam Program Pengembangan *Talent* Kemenkeu. Tak hanya itu, IKU Indeks Efektivitas UKI juga dipasang paling tidak di tingkat Kemenkeu-Two untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI. UKI sebagai lini pertahanan kedua diharapkan mampu lebih efektif melakukan pemantauan atas pengendalian intern di Kemenkeu.

Fraud cenderung menurun

Untuk memperkuat peran pengawasan internal sebagai *early warning tools* dalam pencegahan *fraud*, Itjen menerapkan beberapa langkah. Pertama, pendekatan pengawasan *risk based audit*, yaitu pengawasan yang akan mengidentifikasi proses bisnis berisiko tinggi. “Kami juga melakukan *data analytics* terhadap data Kemenkeu yang ada di Sistem Layanan Data Kemenkeu (SLDK) untuk menemukan anomali dan titik-titik rawan,” ungkap Inspektur Bidang Investigasi Itjen Kemenkeu M. Dody Fachrudin.

Kedua, peningkatan komunikasi antarlini. Secara berkala, Itjen mengadakan kegiatan “Irjen Menyapa” yang mengundang kantor-kantor vertikal di seluruh Indonesia. Ketiga, kampanye antikorupsi dan saluran pengaduan via media sosial. “Dengan pendekatan yang lebih cair seperti ini, diharapkan pesan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat,” harap Dody. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran di Kemenkeu melalui saluran pengaduan WISE (*Whistleblowing System*).

Sejauh ini, Dody menyebut tren pengaduan cenderung menurun sejak tahun 2013 sampai 2000. Pengaduan *fraud* terbanyak adalah penyalahgunaan

wewenang, gratifikasi, dan pengadaan barang/jasa, sedangkan mayoritas pengaduan *non-fraud* terkait pelayanan kepada pihak internal dan eksternal Kemenkeu, pelanggaran administrasi kepegawaian, dan pelanggaran prosedur.

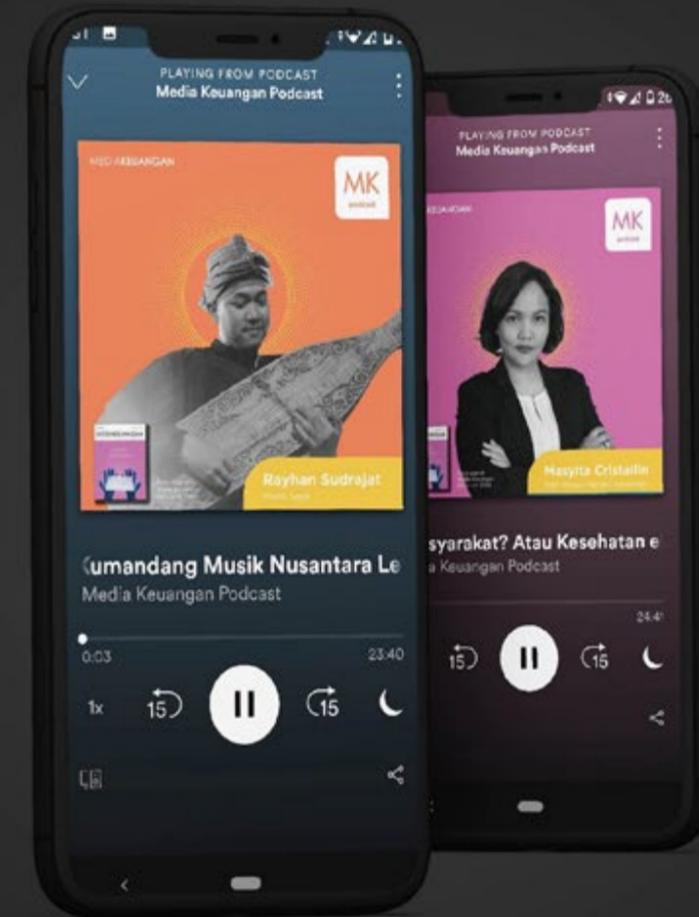
“Jumlah pengaduan *fraud* selalu lebih rendah dibandingkan pengaduan *non-fraud*, berada di kisaran 35 persen dari keseluruhan pengaduan,” ujar Dody. Berdasarkan pengalaman IBI melakukan investigasi, sumber pendeteksian *fraud* terbesar berasal dari pengaduan masyarakat. Partisipasi pegawai dan masyarakat dalam *early warning system* ini terbukti sangat membantu Itjen.

Membangun budaya antigratifikasi

Dody menceritakan, topik gratifikasi paling sering menjadi bahan diskusi dalam kegiatan edukasi antikorupsi di level apa pun. Pegawai memahami larangan gratifikasi, tetapi di sisi lain memiliki budaya ketimuran yang terbiasa saling memberi sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain.

“Namun demikian, dalam kehidupan bernegara dan dalam peran sebagai pegawai Kemenkeu, paradigma seperti ini harus kita sadari dan segera kita ubah. Pada saat menjadi tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik, sediakan data dan dokumen serta fasilitas yang diperbolehkan oleh aturan secara wajar, tanpa mengesampingkan keramahan sebagai inti budaya bangsa kita,” tutur Dody.

Strategi program pengendalian gratifikasi di Kemenkeu, ujar Dody, dibangun melalui transformasi budaya internal dan eksternal. Komitmen pimpinan sangat penting untuk membangun lingkungan bersih dan bebas gratifikasi sehingga mendorong transformasi budaya internal. Sementara itu, transformasi budaya eksternal dapat dilakukan melalui *public campaign*, supaya masyarakat tidak menawarkan apa pun saat berinteraksi dengan Kemenkeu.



Podcast Media Keuangan

Dengarkan serunya wawancara bersama para narasumber pilihan Media Keuangan

Perkuat Pengawasan, Tangkal Penyelewengan

Keseriusan ikhtiar memberantas perilaku korupsi di institusi Kemenkeu akan turut menentukan kecepatan pembangunan dan pewujudan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Apa saja yang sudah dilakukan?

“Kalau kita ingin maju, belanja kita harus tepat sasaran, efisien, dan tidak dikorupsi! Jangan hanya melihat tidak dikorupsi tetapi salah desainnya. Jadi ini adalah tantangan yang lebih tinggi lagi. Reformasi bidang belanja negara sekarang harus kita lakukan”

Sri Mulyani Indrawati, dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2019.



MOU Kemenkeu - POLRI

tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. MoU meliputi:

- Pertukaran data dan/atau informasi
- Bantuan Pengamanan
- Penegakan Hukum
- Peningkatan SDM
- Pejabat penanggung jawab dan kegiatan lain

MOU Kemenkeu - KPK

meliputi kegiatan:

- Pertukaran Informasi dan Data;
- Pengelolaan Barang Milik Negara, Benda Sitaan, Barang Rampasan, dan/atau Barang Gratifikasi;
- Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- Kajian/Penelitian;
- Penyediaan Personil, narasumber, dan Tenaga Ahli;
- Layanan Pengadaan.

MOU Kemenkeu - Kejaksaan Agung

tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. MoU meliputi:

- pencegahan tindak pidana korupsi;
- dukungan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- penegakan hukum; pengamanan pembangunan strategis dan penelusuran aset;
- bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- optimalisasi kegiatan pemulihan aset;
- pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia.

Langkah-langkah penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) :

- Perubahan mindset pengawasan intern
- Penyempurnaan pendekatan pengawasan Itjen
- Implementasi transformasi digital Inspektorat Jenderal
- Pengembangan kompetensi auditor secara berkelanjutan
- Penjagaan dan peningkatan akuntabilitas Pengembangan hubungan organisasi

WAJAH INTEGRITAS DALAM PELAYANAN

Teks Dimach Putra



HELP D

Para pengguna layanan Kemenkeu telah merasakan langsung hasil upaya budaya antikorupsi di Kemenkeu

Foto
Resha Aditya

Integritas. Nilai itu begitu penting bagi warga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Institusi pengelola keuangan negara ini bahkan menempatkannya pada posisi pertama dalam nilai-nilai organisasi Kemenkeu. Integritas bersanding dengan profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Seperti siklus, kelimanya saling terkait. Keberadaan lima nilai itu berperan sebagai fondasi organisasi. Sosialisasi tentang kelima nilai itu gencar dilakukan dalam berbagai acara. Tujuannya satu, membentuk kepribadian insan Kemenkeu tentang pentingnya lima hal utama tersebut. Salah satu tujuan aktualisasi lima nilai tersebut adalah makin kuatnya budaya antikorupsi di Kemenkeu.

Kemenkeu memiliki panjang tentang upaya-upaya memerangi budaya korupsi. Sebagai pengelola keuangan negara, budaya antikorupsi tersebut tak dapat ditawar. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, salah satunya ditentukan dari bagaimana Kemenkeu dapat mengelola uang rakyat, uang kita bersama. Untuk itu Kemenkeu harus menjadi sebuah organisasi yang kredibel dan transparan.

Di Kemenkeu, program antikorupsi dipimpin oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) bekerja sama dengan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di tiap eselon I. Konsorsium ini telah melakukan pemetaan/identifikasi sumber-sumber korupsi pada 12 unit eselon I Kemenkeu. Selanjutnya, tugas audit kinerja dilakukan oleh Itjen sebagai pelaksana audit internal di Kemenkeu. Upaya antikorupsi di Kemenkeu ini tidak hanya berhenti di hasil audit itu saja. Agar program ini membudaya, perlu dukungan seluruh lapisan insan Kemenkeu bersama-sama dalam menjalankan komitmen pencegahan, pengawasan hingga penindakan. Hasilnya mulai terasa. Setidaknya begitulah yang dirasakan oleh para pengguna layanan Kemenkeu.

Berkawan dengan pajak

Putri adalah wanita karier yang tinggal di Surabaya. Suatu hari ia menerima surat dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Isinya tentang pemberitahuan mengenai permintaan penjelasan data wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi. Jujur diakui, ia sempat merasa bingung saat membaca surat tersebut. Berurusan dengan kantor pajak bukanlah hal yang diinginkan siapapun. Bayangan

petugas pajak yang birokratis dan “basah” juga sempat hinggap di pikirannya. Tak mau berkubang dalam prasangka, ia pun segera menghubungi nomor *account representative* (AR) yang tercantum di dalam surat tersebut.

Tak lama menunggu, ia menerima balasan di aplikasi pesan ponselnya. Putri menanyakan maksud dari surat yang diterimanya. Lewat ponsel ia bertanya pada petugas bernama Tri. Dari petugas pajak ini Putri jadi tahu letak kesalahpahamannya. Ternyata terkait kredit pemilikan rumah (KPR) atas nama dirinya. Dari detail informasi itu, Putri seharusnya sudah harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sendiri. Saat mengambil KPR ia memakai NPWP suami. Seperti diketahui, seorang istri tidak wajib punya NPWP jika sang suami sudah memiliki. Tapi, masalahnya timbul karena data pembuatan kartu keluarga baru belum diperbarui di sistem. Sehingga, ia seakan tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagai individu yang seharusnya wajib memiliki NPWP.

Masalah Putri akhirnya teratasi dengan mengirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan ke AR. Dua kali ia berurusan dengan petugas pajak, dua kali pula ia merasa sangat terbantu. Selama proses penyelesaian masalah, AR juga memberi informasi dengan lugas dan apa adanya, tak ada ruang untuk *fraud*. “Gak dilama-lama-in juga. Kalo lama kan bisa disebut korupsi waktu juga ya”, ucapnya sambil berseloroh. Ia lalu menambahkan, “Beda lah sama persepsi orang kebanyakan sama orang pajak yang dulu.”

Layanan pasti antikorupsi

Kita kini hidup di era teknologi tinggi. Untuk melawan korupsi di zaman yang serba canggih ini, harus dilakukan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi. Itu menjadi salah satu alasan hadirnya Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenkeu. Sistem pengadaan di instansi pemerintahan yang dulu identik rawan terjadi *fraud*, kini dilakukan

dengan prinsip transparan dan *fair* memanfaatkan teknologi. Pengalaman itu yang diceritakan oleh Ina Marlina. Perempuan yang akrab disapa Ina ini sehari-hari bekerja sebagai *business development manager* di EXPERD Consultant.

“Kalau di LPSE semua data dan informasi itu sangat terbuka dan jelas. Persyaratan, kriteria dan semuanya bisa kita akses,” beber Ina. Perusahaan tempatnya bekerja yang menyediakan jasa pengembangan sumber daya manusia (SDM) itu juga kerap mengikuti proses lelang di institusi lain di luar LPSE Kemenkeu. Jika harus membandingkan, keunggulan LPSE Kemenkeu terletak pada layanan *help desk* yang tersedia. Ina harus memberi dua jempol untuk kesigapan petugas *help desk* menjawab pertanyaannya jika menemui masalah terkait proses lelang. Kanal *help desk* yang ditawarkan Kemenkeu dinilai lebih beragam, tak hanya via *call center* dan surat elektronik. “Kalau di tempat lain, bahkan ada nomor yang tercantum di web itu tidak dapat dihubungi,” ungkap Ina.

Saat ditanya tentang keluhan terkait pelayanan yang mungkin pihaknya rasakan, Ina hanya mengeluhkan tentang kendala teknis terkait sistem. Namun, hal itu bisa tertutupi dengan kecekatan petugas *help desk* memberikan pendampingan dan bimbingan untuk memecahkan masalah yang timbul. Entah sudah berapa kali ia menelpon atau berbalas pesan dengan petugas. Meski sering berhubungan dan mungkin dibantu petugas yang sama, hubungan yang terjadi tetap sangat profesional. Ada yang bilang korupsi bisa terjadi karena ada kesempatan dan interaksi. Tapi, Ina tak sedikitpun meragukan integritas pegawai Kemenkeu. “Gak ada korupsi, ga ada bayaran apapun. *Free of charge* lah pokoknya!” tutup Ina puas.

PIAWAI MELINDUNGI INSTITUSI

Teks CS. Purwowidhu

Keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari peran pengawasan intern dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Simak petikan wawancara Media Keuangan dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, mengenai penguatan peran pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komponen apa yang paling utama dalam membangun struktur pengendalian intern yang efektif?

Internal control structure itu bukan hanya di Inspektorat Jenderal (Itjen) melainkan satu organisasi Kemenkeu secara keseluruhan.

Faktor terpenting di sini tentunya pucuk pimpinan sebagai orang yang akan membawa ke arah mana jalannya kapabilitas kita dalam pengendalian intern. Jadi kita berfokus pada *tone of the top* (penegakkan integritas dari pimpinan), *walk the talk* (menjalankan ucapan melalui perbuatan), dan *role model* (pimpinan dapat menjadi panutan). Itu yang benar-benar harus dibangun.

Seperti apa model sistem pengawasan

Internal yang diterapkan di Kemenkeu?

Kemenkeu dengan pegawai sebanyak kurang lebih 80 ribu orang dan 1098 kantor yang tersebar di penjuru Indonesia bertanggung jawab mengawal keuangan negara sebesar APBN setiap tahunnya. Besarnya aset yang dikelola Kemenkeu tentunya memerlukan pengawasan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita mengembangkan konsep *three lines of defense* dalam mendukung *overall assurance* atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dalam proses bisnis Kemenkeu.

Lini pertama adalah mereka yang menjalankan secara langsung *day to day* bisnis di unit atau satker masing-masing. *Internal control* dibangun kuat di situ baik melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun *tools* untuk menjaga agar tidak terjadi *fraud*. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal (UKI). Mereka bertugas menjaga *compliance* orang-orang yang ada di kantornya. Kemudian Itjen sebagai lini ketiga pertahanan. Oleh sebab

itu, dalam menjalankan tugas kita harus berkolaborasi dengan UKI yang ada di setiap unit Eselon 1. Kita juga terus melakukan pembinaan dan penguatan UKI tersebut

Dalam hal apa saja keefektifan peran UKI dapat diperkuat?

Di samping menguatkan peran UKI sebagai unit pengendali gratifikasi, Itjen juga berupaya mengefektifkan peranan UKI dalam pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja, *profiling* pegawai, dan dalam *financial reporting system* (FRS). *Profiling* pegawai diperlukan agar *resources* di setiap kantor dapat dialokasikan dengan baik, yang berisiko bisa dibina dan dimitigasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kantor kita.

Sejak 2 tahun lalu kita juga menyiapkan skenario risiko *fraud* untuk setiap fungsi yang dijalankan unit teknis sehingga profil pegawai yang ditempatkan untuk fungsi yang berisiko tinggi harusnya orang yang benar-benar mampu menjaga integritas dirinya maupun lingkungan kerjanya. Kemudian juga sistemnya dibesarkan supaya tidak terjadi *fraud*. Jadi tujuan kita lebih ke pembinaan, pencegahan, dan membangun sistem pengendalian ini. Sekarang UKI juga diberikan akses terhadap data atau informasi dari sistem yang ada di instansinya sehingga melalui data atau informasi yang ada, maka yang bersangkutan juga bisa melakukan analisis tentang transaksi atau jalannya pelayanan yang ada di instansinya.

Sejak tahun 2017 Itjen diberi kepercayaan oleh KPK untuk melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) secara mandiri. Sejauh mana perkembangan integritas Kemenkeu?

Setiap tahun kita melaksanakan SPI dengan jumlah responden biasanya 20 ribu lebih, dari internal maupun eksternal Kemenkeu. Skor antarunit Eselon I berbeda-beda,

namun Alhamdulillah semua terus mencerminkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menandakan adanya upaya yang bagus dari setiap unit Eselon 1 Kemenkeu untuk terus membangun integritasnya secara konsisten. Nilai kita sudah mencapai 91 koma sekian. Itu luar biasa tinggi. Hasil SPI ini digunakan dalam menyusun program penguatan integritas di Kemenkeu agar terarah dan sesuai kebutuhan tiap unit. Dengan integritas yang tinggi maka kita dapat membangun *public trust* untuk Kemenkeu.

Bagaimana upaya Itjen dalam mengoptimalkan pengawasan?

Utamanya yang kita lakukan berupa pendekatan preventif. Itjen itu pada masa baru berdiri perannya lebih sebagai *watchdog*, ada orang salah baru teriak. Tapi sekarang kita mengarah kepada *trusted advisor*. Kita menjadi *strategic business partner*, kita mengawal *end-to-end* program Kemenkeu mulai dari perumusan kebijakan sampai nanti pada saat audit BPK Itjen mendampingi. Ini semua dalam rangka menjaga GRC (*governance-risk-compliance*) Kemenkeu. Dengan perkembangan IT saat ini maka sedapat mungkin kita menaruh alat kontrol di dalam sistem IT sehingga bila terdapat anomali bisa langsung terdeteksi. Untuk sistem yang telah stabil dan valid dapat diberikan ke unit-unit untuk dijalankan. Ini sudah kita jalankan untuk pelaporan keuangan sehingga sudah jauh lebih nyaman dan mudah diawasi.

Upaya preventif lainnya kita juga terus mengampanyekan gerakan anti korupsi, edukasi integritas dan perlindungan saksi melalui berbagai media, melaksanakan survei, permintaan laporan, membuat ketentuan terkait integritas dan kode etik, dan sebagainya. Kita juga sering melakukan *spot check* atas pelayanan masyarakat di lingkungan Kemenkeu.

Bagaimana Itjen mengatasi audit di tengah krisis pandemi?

Kami tetap menjalankan audit. Alhamdulillah 2 tahun lalu kita sudah mulai memantapkan audit *management system* yang seluruhnya berbasis IT. Kita sudah menggunakan seluruh komponen yang disiapkan mulai perencanaan dan lain sebagainya sampai dengan pelaporan, monitor, tindak lanjut, semua sudah berbasis IT. Mulai 2 tahun yang lalu kita juga melatih level operator, manajerial, sampai eksekutif, bahkan sudah 2 putaran. Kemudian sistemnya juga sudah kita pelajari. Sarana dan prasarananya juga sudah kita siapkan antara lain membangun *War Room* sebagai bagian besar dari revolusi IT di Itjen. Berbagai *dashboard* di Kemenkeu terintegrasikan ke *War Room* untuk dikelola datanya dari segi pengawasan. Sudah ada kerjasama dengan unit untuk menyiapkan data yang diperlukan melalui SLDK (Sistem Layanan Data Kemenkeu). *Trust* dan komitmen antarpihak menjadi tantangan kelancaran penyediaan data.

Apa harapan Ibu bagi kemajuan peran Itjen ke depan?

Saya berharap ke depan Itjen menjadi *trusted advisor* dan *strategic business partner* yang bisa memberi nilai tambah pada area-area yang masih memerlukan perbaikan di bagian manapun di Kemenkeu, namun dengan tetap menjaga *compliance*. Itjen juga perlu mengembangkan diri secara simultan dengan perkembangan sistem IT unit-unit Eselon 1 di samping harus mampu melakukan audit berbasis data yang dihasilkan dari sistem agar dapat memberikan *assurance* maupun *consulting* ketika mengawal *end to end* program kerja Kemenkeu. Harapannya agar Itjen tidak hanya responsif terhadap kondisi yang ada, tetapi juga bisa memberikan masukan yang bersifat antisipatif ke depan. Sehingga Itjen Kemenkeu benar-benar bisa menjadi *guardian angel*.

Sumiyati,
Inspektur
JenderalDok. Media
Keuangan

Cerita Kopi

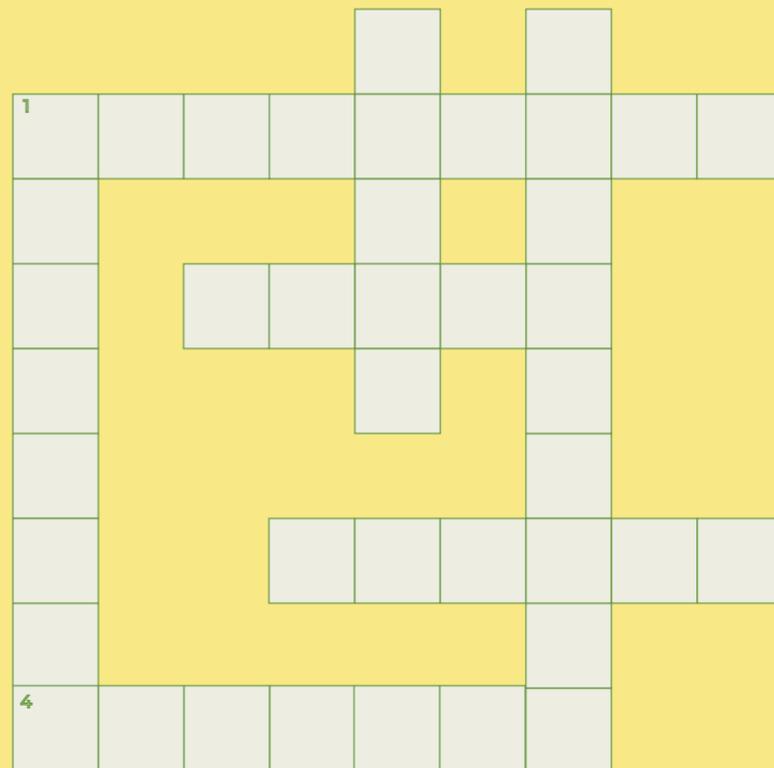
Foto Habibullah Yusyaf | Teks Anas Nur Huda

Indonesia adalah surga kopi dunia, karena tidak ada sebuah negara pun di dunia yang memiliki keragaman kopi seperti di Indonesia. Salah satu jenis kopi yang terkenal yaitu kopi gayo dengan tingkat keasaman yang rendah dan tidak pahit. Selain itu, cita rasa yang nikmat terletak pada pengolahannya. Sejumlah pekerja pria menyangrai biji kopi di atas tungku batu dengan cara lama. Biji kopi yang masuk ke dalam tabung besi dipanaskan pada api menyala. Setelah biji kopi mencapai kematangan sempurna, harus segera diangkat. Kopi lalu dipindahkan ke dalam lesung untuk ditumbuk menjadi bubuk kopi.



ka *Teki
Med

Medken *Teka *Teki



Mendatar

- 1 Januari
- Tingkatan hidup lepas dari keduniawian
- Nama depan pimpinan unit dalam rubrik Potret Kantor
- Lantang, keras (tentang suara, bunyi)

Menurun

- Ibu kota kabupaten Aceh Tengah
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Balai besar tempat raja dihadap rakyatnya

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 Januari 2021.

Gaya Baru Mengunjungi Museum

Teks Reni Saptati D.I | Foto Dok. Pribadi

Apa benar berkunjung ke museum itu membosankan? Erwin Djunaedi berani membuktikan bahwa jawabannya tidak benar. Museum adalah sarana petualangan dan sumber keceriaan. Bersama rekan-rekannya, pria lulusan jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) ini membentuk Komunitas Malam Museum. Mereka rutin mengadakan beragam acara menarik di museum yang selalu ramai peminat.

Delapan tahun berdiri, program komunitas berjalan lancar. Lalu, tiba-tiba pandemi datang. Kepada Media Keuangan, Erwin membagikan kisah bagaimana Komunitas Museum Malam beradaptasi di era pandemi. Ia juga menceritakan awal mula berdirinya komunitas serta berbagai hal menarik lainnya tentang museum dan sejarah. Simak perbincangan kami berikut ini.

Bagaimana cerita terbentuknya Komunitas Malam Museum?

Komunitas ini berawal dari program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan yang digagas lima mahasiswa dari jurusan Sejarah dan jurusan Pariwisata FIB UGM. Pada tahun 2012, kami mengajukan proposal program *Night at The Museum* ke Kemendikbud, tepatnya ke Ditjen Dikti (dulu).

Kami memang suka jalan-jalan ke museum dan tempat bersejarah, serta terinspirasi dari film *Night at the Museum*. Awalnya program ini bersifat *profit oriented*. Selama setahun, Dikti mendampingi kami. Setelah pendampingan selesai, para *founder*-nya punya kesibukan masing-masing sehingga kemudian saya sendiri yang melanjutkannya.

Mengapa Anda tertarik untuk melanjutkannya?

Program ini menarik, respons yang datang terutama dari generasi muda di Jogja sangat luar biasa. Pendaftaran yang kami buka selalu *full*, bahkan ada *waiting list*. Jadi, saya berpikir masa depan program ini akan sangat baik. Maka, saya bertahan dengan merekrut teman-teman dekat.

Namun, kemudian kami menyadari bahwa museum itu ternyata, *pertama*, adalah lembaga nirlaba, sehingga kami pun memutar haluan dari yang tadinya program kewirausahaan menjadi komunitas nirlaba. *Kedua*, angka kunjung museum itu kecil jika dibandingkan dengan tempat-tempat wisata lainnya, seperti gunung dan pantai. Kami ingin menggugah semangat teman-teman lain, terutama generasi muda, untuk mau berkunjung ke museum. *Gimmick*-nya adalah jelajah malam hari di museum. Ternyata minat masyarakat sangat tinggi.

Pada 2014, program tersebut berubah menjadi komunitas. Karena akta pendiriannya wajib menggunakan

bahasa Indonesia, nama *Night at the Museum* berubah menjadi Komunitas Malam Museum. Istilah “malam museum” kami pertahankan sebagai *gimmick* untuk membangkitkan rasa penasaran.

Apa saja kegiatan yang diadakan?

Konsep kegiatan awal kami adalah kunjungan ke museum yang didampingi oleh edukator atau *guide*. Setelah acara jelajah museum, kami membuat *games*. Ada juga pentas musik tradisional, diskusi, serta pembagian hadiah. Semula kegiatan dimulai setelah magrib dan selesai jam sepuluh malam. Namun, ada masukan dari para peserta agar acara dimulai sore. Akhirnya kegiatan dimulai jam empat sore dan selesai maksimal jam sembilan malam.

Kami juga punya program bernama *Kids In Museum* untuk anak-anak usia 6-12 tahun yang diadakan pagi hari. Selain itu, ada bedah film dan bedah buku di museum. Tidak lama berselang, hasil diskusi kami dengan peserta melahirkan ide baru, yakni sebaiknya kami merambah juga ke situs bersejarah. Akhirnya kami melahirkan program Kelas *Heritage*, yaitu kunjungan situs-situs bersejarah yang jarang orang ketahui.

Apa museum atau situs bersejarah yang paling jauh dikunjungi?

Museum Sangiran. Kami pernah mengadakan jelajah malam di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Untuk di Jogja sendiri, kegiatan jelajah malam masih terfokus di museum area kota dengan pertimbangan keselamatan peserta.

Kegiatan jelajah museum pernah diselenggarakan di Museum Benteng Vredeburg, Museum Monumen Jogja Kembali, Museum TNI Angkatan Udara, Museum Sandi, Museum Negeri Sonobudoyo, Museum Anak Kolong Tangga, dan Museum Jenderal Sudirman. Tetapi untuk yang kegiatan

pagi, terutama *Kids In Museum*, hampir seluruh museum sudah disasar. Ada sekitar 60 museum di Jogja.

Sejauh ini, apa museum yang menjadi primadona untuk jelajah malam?

Museum Benteng Vredeburg menjadi primadona karena merupakan benteng peninggalan VOC. Dibangun tahun 1750-an, pada saat Jogja baru berdiri, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Lokasinya cukup luas, punya gedung cukup banyak, dan banyak diorama yang bisa dieksplor.

Pihak museum Benteng Vredeburg bahkan menjadikan jelajah malam di museum sebagai program kerja mereka dan melibatkan Komunitas Malam Museum sebagai mitra. Pada 2019, kami mengadakan delapan kali kegiatan. Pada 2020 ini sebenarnya direncanakan dua belas kali, tetapi baru terselenggara tiga kali karena pandemi. Terakhir diadakan tanggal 15 Maret 2020. Setelah ada kasus positif COVID-19 di Jogja, semua kegiatan *offline* dibatalkan.

Bagaimana adaptasi yang dilakukan di era pandemi?

Semuanya pasti kaget dengan pandemi ini. Begitu juga kami, dari yang tadinya sangat sibuk dengan program kerja komunitas, pergi ke mana-mana, tiba-tiba berhenti dan menjadi *online* semua.

Supaya komunitas ini tidak hilang, tetap berkegiatan, kami membuat kegiatan webinar diskusi kesejarahan via Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Selain itu, kami memproduksi konten yang lebih bervariasi. Kami menggunakan platform *website*, Instagram, Twitter, Line, dan Facebook untuk publikasi konten. Selanjutnya, mulai September kemarin kami mengadakan kegiatan *offline* dengan peserta terbatas dan protokol kesehatan ketat.

Bagaimana respons masyarakat terhadap kegiatan online dan kegiatan offline terbatas tersebut?

Responsnya sama baiknya seperti sebelum pandemi. Kami berusaha membuat webinar dengan tema-tema yang anti *mainstream* supaya lebih menarik, misalnya tentang berhaji di masa kolonial, atau pariwisata di masa kolonial.

Pada bulan September, kami sudah mulai berkegiatan *offline* dengan protokol kesehatan ketat. Kami berkunjung ke situs bersejarah dengan peserta terbatas dan mematuhi protokol kesehatan. Yang dulunya melibatkan sekitar 50 orang, kemudian dibatasi menjadi maksimal 20 orang.

Pada bulan Oktober, kami juga sukses menyelenggarakan jelajah museum di pagi hari dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah peserta terbatas. Animonya luar biasa banyak. Kami baru satu jam membuka pendaftaran di media sosial, kuotanya langsung penuh. Bahkan *waiting list*-nya banyak sekali.

Jadi, sebenarnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum dan berwisata sejarah itu tinggi, ya?

Betul. Banyak orang mau belajar tentang sejarah, mau ke museum dan situs bersejarah, tetapi mereka tidak punya wadahnya. Komunitas Malam Museum hadir mewadahi itu. Jangan dikira generasi milenial itu malas ke museum. Ternyata tidak. Ternyata mereka punya animo besar terhadap museum. Hanya saja memang pengemasannya butuh *effort* lebih.

Apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola kekayaan sejarah yang kita miliki?

Pertama, sejarah punya stigma buruk. Kurikulum kita sangat menekankan hafalan sehingga siswa menjadi bosan. Komunitas Malam Museum menghadirkan



Kegiatan Museum Malam

Foto Dok. Pribadi

gaya baru belajar sejarah yang lebih menyenangkan. Kami mencoba untuk menghadirkan mereka di museum, melihat secara visual seperti apa baju tokoh-tokoh pahlawan, atau benda yang menyertai peristiwa-peristiwa bersejarah. Mereka menjadi tertarik.

Kedua, pentingnya metode *storytelling*. Jadi, bagaimana kita menyampaikan kepada pendengar dengan cara menarik. Sejarah itu bukan hanya masa lalu. Sejarah juga bisa membicarakan tentang apa yang terjadi hari ini akibat dari peristiwa masa lalu, dan meneropong masa depan. Ketiga, belajar sejarah itu banyak jenisnya. Bisa dengan film, novel sejarah, animasi, bahkan *games*. Kami mengawinkan sejarah dengan pariwisata yang sifatnya *fun*. Terakhir, mengenalkan mereka

dengan sejarah lokal.

Mengapa penting bagi kita untuk belajar sejarah?

Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dalam pembelajaran sejarah ada istilah *changing and continuity*, atau perubahan dan kontinuitas dalam sejarah yang berlanjut. Polanya sama, meskipun orang-orang atau subjek yang terlibat sudah berubah.

Belajar sejarah juga membuat kita tidak gampang diprovokasi dan termakan hoaks. Pembelajaran sejarah mengajarkan kita untuk melakukan penelusuran berdasarkan sumber yang valid dan berpikir runut. Terakhir, sejarah itu ditulis bukan untuk masa lalu, melainkan untuk masa kini dan masa depan.



Gedung
KPPBC
Denpasar

Foto
Dok. KPPBC
Denpasar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai (KPPBC) Denpasar

Di Bawah Kendali Srikandi

Teks A. Wirananda

Pada hari-hari yang seperti belakangan ini, kita tak lagi bisa berharap pada kebiasaan. Kemampuan menyesuaikan diri jadi kunci untuk terus bertahan di tengah pandemi yang tak lekas usai. Berbagai perkara yang semula kita anggap musykil, belakangan berangsur kita terima sebagai hal lazim.

Pantang surut

Kegiatan patroli yang umumnya berupa pengawasan fisik turut mengalami penyesuaian. Selama pandemi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Denpasar melakukan penyesuaian dengan menggelar patroli online. Kusuma Santi Wahyuningsih, kepala KPPBC Denpasar mengatakan, patroli *online* ini sebenarnya tidak sulit dilakukan. “Gampang kok. Tinggal duduk di depan komputer, kemudian *search* dan lakukan analisa,” ujarnya sambil tersenyum.

Terdapat setidaknya dua mekanisme patroli online. Pertama, dengan melakukan penelusuran melalui berbagai kanal perdagangan daring. Umumnya, kata kunci untuk barang yang diduga ilegal ini menggunakan sandi tertentu. Setelah lokasi

dikantongi, tim KPPBC Denpasar akan mencari tahu dan mendatangi lokasi barang yang diperdagangkan atau diproduksi. Mekanisme berikutnya adalah dengan bermain peran sebagai calon pembeli barang. Dengan pola ini, tak jarang pedagang atau produsen mengendus kecurigaan. “Biasanya mereka itu seumpamanya sudah ada indikasi ada yang mengatensi, *nggak* akan jadi jual barangnya dan menghilang,” ujar penyandang gelar *Master of Economics* dari Kobe University, Jepang ini.

Ihwal penindakan, KPPBC Denpasar terbilang cukup aktif. Sepanjang 2019 sampai dengan Agustus 2020, KPPBC Denpasar telah melakukan lebih dari 900 penindakan dengan total perkiraan kerugian negara mencapai tujuh miliar rupiah. Barang tegahan ini umumnya didominasi oleh kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), rokok ilegal dan barang-barang impor *e-commerce* yang tidak memenuhi ketentuan.

Potensi lokal

Ihwal sinergi, kantor yang memiliki 126 pegawai ini salah satu yang layak jadi panutan. Dalam hal penindakan peredaran narkoba, KPPBC Denpasar menjalin hubungan baik dengan Badan



Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dan berhasil mengungkap sindikat ganja nasional di Singaraja. Demikian pula dalam mendongkrak perekonomian lokal, KPPBC Denpasar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota di Bali serta instansi lainnya. Hal yang menjadi prioritas dalam kerja sama ini adalah peningkatan ekspor komoditas lokal Bali dan potensi arak Bali melalui tata kelola yang lebih laik.

Santi mengatakan, program ini berorientasi pada kesejahteraan petani atau perajin arak Bali. "Orientasinya itu adalah kesejahteraan petani. Utamanya di situ," ia melanjutkan, "dan juga kita bisa berharap untuk dapatkan cukainya sebagai penerimaan negara." Selain itu, Santi juga menaruh harapan supaya arak Bali tidak sembarangan dikonsumsi. "Kita *concern* supaya ini (arak Bali) dikonsumsi oleh orang yang tepat," ujar Santi. Sejalan dengannya, pemerintah

daerah juga memiliki harapan agar arak Bali berkembang dan menjadi produk kebanggaan Bali. "Kita mau menaikkan prestisenya arak ini jadi setingkat kayak Soju-nya Korea, kayak Sake-nya Jepang," ujar perempuan kelahiran Surakarta ini.

Selain arak Bali, saat ini komoditas kerajinan tangan, furnitur, dan pertanian sudah lebih dulu menembus pasar internasional. Santi mengatakan, "Handicraft itu nggak ada matinya," ia melanjutkan, "dan ini memang masih mendominasi dari seluruh ekspor yang ada di Bali." Di sektor pertanian dan kelautan, ekspor dari Bali didominasi oleh manggis, buah naga, dan kerang hias. Santi mengatakan, mayoritas pelaku industri ini adalah sektor kecil menengah. Dalam upayanya meningkatkan ekspor ini, Santi menjalin kerja sama antara lain dengan pemerintah daerah, karantina, perusahaan daerah, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

untuk giat jemput bola. Selain itu, melalui Klinik Ekspor, KPPBC Denpasar giat memberikan asistensi kepada para pelaku industri kecil dan menengah agar mereka dapat melakukan ekspor sendiri, dengan mengacu pada jargon "Ekspor itu mudah dan UMKM Berani Ekspor Sendiri".

Optimalisasi Benoa

Selain peningkatan potensi produk lokal melalui ekspor, Santi mengatakan salah satu hal lain menjadi fokusnya adalah pemanfaatan pelabuhan Benoa. Selama ini, ekspor melalui pelabuhan Benoa terbilang sangat kecil. Situasi seperti itu, kata Santi, adalah akibat dari minimnya jumlah pelayaran melalui Benoa dan masih banyaknya eksportir yang memilih jalur darat. Penggunaan jalur darat tentu saja menimbulkan ongkos sosial yang tinggi, mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, kecelakaan dan terganggunya pariwisata Bali. KPPBC Denpasar menjadi *prime mover* menjalin koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, PT Pelindo III, perusahaan pelayaran, dan para eksportir. Pihak-pihak ini menyepakati Nota Kesepakatan untuk efisiensi biaya logistik atas ekspor melalui Benoa.

Peningkatan ekspor melalui Benoa ini sejalan dengan program Nasional Benoa Maritime Tourism Hub 2020-2023 yang diinisiasi untuk peningkatan Pariwisata Bali di tingkat dunia. Dalam mendukung program tersebut, KPPBC Denpasar berperan memberikan layanan *Vessel Declaration (VD)* untuk kapal pesiar (*cruise*) dan yacht, serta barang-barang yang dibawa penumpang. Di sisi lain KPPBC Denpasar juga melakukan peran pengawasan terhadap penyelundupan barang dan narkoba dari kedatangan kapal pesiar tersebut. Dengan jalinan kerja sama yang ada saat ini, Santi berharap industri pariwisata maupun kegiatan ekspor di Benoa dapat berjalan beriringan dengan baik untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Prosedur Permohonan Informasi PPID Kemenkeu

1

Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID

2

Pemohon mengisi formulir permohonan informasi

3

Pemohon menerima tanda bukti apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi

4

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID dalam 10 hari dan/ atau dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja



Inspirasi Sang Dokter Inspiratif

Teks Dimach Putra | Foto Dok. Pribadi

Profesi dokter di Kementerian Keuangan boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari. Namun, ada seorang dokter yang namanya mencuat pada peringatan Hari Oeang yang diselenggarakan secara daring Oktober lalu. Ia masih muda, tapi berhasil terpilih menjadi salah satu pegawai inspratif di Kemenkeu.

Adalah dr. Nur Zahratul Jannah. Perempuan kelahiran 1991 ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Dokter Zahra, begitu ia akrab disapa oleh pegawai lainnya di kompleks Kemenkeu Pusat. Sehari-hari ia bertugas di Balai Kesehatan (Balkes) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang pengelolaannya diserahkan ke Biro Umum, Sekretariat Jenderal.

Bukan warisan

Dokter adalah sebuah profesi yang biasanya dilakukan turun menurun di dalam keluarga. Alasannya beragam. Bagi yang terlahir dari keluarga pasangan dokter, pasti terbiasa melihat orang tua melakukan pekerjaan itu sehingga akhirnya terinspirasi menjalani profesi yang sama. Ada juga dokter yang harus melanjutkan warisan klinik, rumah sakit atau sekedar nama besar keluarga. Tidak demikian dengan ibu dua anak ini. Ia berasal dari keluarga

dengan latar belakang non medis. Zahra adalah dokter pertama di keluarganya. Setidaknya bagi keluarga intinya. “Beberapa sepupu juga ada yang dokter, tapi kami ini generasi pertama di keluarga besar,” ungkap perempuan asal Yogyakarta ini.

Saat ditanya apa yang membuatnya ingin menjadi dokter, Zahra menceritakan masa lalunya. Saat kecil, ia pernah terjatuh parah. Kejadian tersebut menyebabkan kepalanya bocor. Kedua orang tua Zahra bergegas membawanya berobat. Syukurlah sang dokter dapat mengobati luka di kepalanya itu dengan telaten dan baik. Peristiwa tersebut begitu membekas dalam ingatan Zahra. Hal itu tanpa ia sadari terpatri dalam alam bawah sadarnya. Ia ingin menjadi dokter yang bisa merawat dan menyelamatkan nyawa orang lain juga.

Tenaga kesehatan pemerintahan

Berpraktik di institusi pemerintahan adalah salah satu opsi karier seorang dokter. Umumnya mereka bergabung menjadi tenaga medis di beberapa rumah sakit milik pemerintah, atau di institusi dengan latar belakang kesehatan. Tapi berpraktik di institusi pengelola keuangan negara? Itu lain soal. Kisah Zahra dimulai pada Juli tahun lalu. Ia mengajukan lamaran tertulis untuk menjadi dokter di Balkes. Lamarannya tersaring, ia melaju ke tes

wawancara dan materi. Setelah melalui beberapa tahapan rekrutmen, Zahra dinyatakan lolos. Ia memulai babak barunya bertugas sebagai pegawai pemerintahan non pegawai negeri (PPNPN) di bidang medis yang bertugas di Balkes Kemenkeu sejak Januari 2020.

Zahra mengaku beruntung mendapatkan kesempatan berpraktik di Balkes. Ia sebenarnya merasa tugasnya tak jauh berbeda dengan berpraktik di klinik umum. Jika di luar, tugas dokter lebih banyak dalam hal kuratif, mengobati penyakit. Di Kemenkeu selain hal tersebut, ia juga sangat aktif menjalankan fungsi lainnya di bidang promotif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Dua hal ini makin intens dilakukan akibat bergesernya pola penyakit dari infeksi ke penyakit degeneratif. Di Kemenkeu, tugas tersebut diamanahkan ke Balkes melalui program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

Perbedaan terbesar berpraktik di Balkes baginya, yang membuatnya terkesan, adalah pengelolaan data populasi di Kemenkeu. Perempuan ini melihat pengelolaan rekam medis di Kemenkeu sudah tersip dengan sangat rapi. Arsip kesehatan ini membantunya dalam memperoleh informasi riwayat kesehatan pasien. Hal ini memudahkannya memberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi

pasien tersebut. “Ke depan inovasi terbaru di bidang kesehatan pasti terkait pengolahan data dari big data rekam medis ini,” ucapnya.

Tuntutan adaptasi dalam pandemi

Saat pandemi COVID-19 mulai melanda global di awal tahun 2020, Zahra baru saja memulai kariernya menjadi dokter di Kemenkeu. Ia merasakan perubahan drastis dalam dua bulan masa tugasnya. “Banyak protokol kesehatan baru yang harus dipelajari ekstra cepat supaya bisa beradaptasi,” ucapnya.

Sama halnya tenaga kesehatan di luar lingkungan Kemenkeu, para dokter di Balkes kini harus mengenakan alat pelindung diri (APD) saat bertugas. Hari-hari dr. Zahra dan para dokter lain di Balkes kini diisi dengan pelaksanaan *rapid* dan *swab test* yang rutin untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan para pegawai. Pemberian layanan kesehatan lain juga tetap dilakukan meski harus dibagi per-*shift*. Konsultasi secara daring pun disediakan para dokter Balkes untuk pegawai yang mengalami keluhan atau ingin konsultasi tapi takut untuk datang ke klinik.

Zahra paham betul bahwa semua orang saat ini merasa cemas, takut, atau bingung menghadapi pandemi yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Tak terkecuali bagi para dokter. Di depan pasien, mereka harus tetap positif dalam memberikan layanan. Namun saat sedang sendiri, atau istirahat, campur aduk perasaan itu juga kerap ia alami. Zahra mengingatkan tentang pentingnya kontrol dan sistem penyalur dari diri kita sendiri. “Kalau saya biasanya curhat dan memberi penguatan dengan teman. Selain itu saya suka menggambar,” bebernya.

Terinspirasi dan menginspirasi

Linimasa karier dr. Zahra di Kementerian Keuangan memang terlihat masih sangat singkat. Tapi,



itu bukan penghalang baginya untuk menorehkan prestasi. Baru-baru ini pada *Family Gathering* Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-74, yang diselenggarakan secara daring, ia dinobatkan menjadi salah satu “Pegawai Inspiratif Kemenkeu 2020”. Zahra mengaku sangat bangga sekaligus terharu karena bisa disandingkan dengan pegawai-pegawai Kemenkeu lain yang berprestasi di bidangnya masing-masing. “Paginya saya masih bertugas di lapangan, berjaga sebagai tim medis di upacara yang dilaksanakan terbatas dan sesuai protokol kesehatan, tidak menyangka apa-apa,” kenangnya.

Peristiwa itu bukan malah membuat dokter muda ini jemawa. Pengalaman ini malah mengajarkannya untuk lebih rendah hati. Zahra merasa bahwa justru dirinya yang mendapat inspirasi dari orang-orang yang ditemuinya selama bertugas di Balkes. Ia merasa lega bahwa dirinya bisa diterima dan selalu mendapat suntikan semangat serta bimbingan dari para dokter

senior yang bertugas di Balkes. Ia juga banyak mendapat inspirasi dari atasannya di Biro Umum Setjen yang tetap memastikan layanan pendukung di kantor-kantor Kementerian Keuangan tetap berjalan. Ia pun bersyukur meski kariernya masih sangat “hijau”, ia tetap dinominasikan oleh atasannya. “Inspirasi yang saya dapatkan itu adalah kumpulan inspirasi yang saya temui di unit saya,” ungkapnya.

Live in the moment. Moto itu yang berusaha dipegang dr. Zahra dalam hidupnya. Ia merasa nilai tersebut bahkan masih relevan dalam kondisi pandemi yang serba sulit ini. Sebagai manusia, semua perasaan yang kita rasakan adalah valid. Namun menurutnya, kita tidak perlu fokus pada hal-hal yang negatif. Zahra berpesan agar kita selalu percaya akan adanya kemudahan dari setiap kesulitan yang kita alami. “Kita belum tahu kemudahannya seperti apa, makanya kita harus terus cari tahu dan melangkah maju,” tutupnya.

Buku

Menelisik Resep Ruang Kelas di Finlandia

Teks Shinta Amalia



Aristoteles, filsuf dunia, mengatakan bahwa pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Tak heran jika tiap-tiap negara mengerahkan segala upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan mereka. Kunci keberhasilan pendidikan suatu negara berakar dari proses belajar mengajar yang ada di ruang kelas. Lalu, bagaimana seharusnya kita memahami proses belajar mengajar yang baik?

Teach Like Finland adalah hasil

riset mendalam yang dilakukan oleh Timothy D. Walker. Beliau adalah seorang guru berkebangsaan Amerika, yang saat ini tinggal di Finlandia. Hasil studi internasional OECD menyatakan bahwa anak-anak Finlandia memiliki kemampuan terbaik dalam menyelesaikan ujian PISA. PISA berhubungan dengan kemampuan membaca, matematika, dan penalaran ilmiah yang dimiliki oleh para siswa.

Cerita kepayahan penulis menjadi seorang guru di Massachusetts-Amerika dipilih sebagai pembuka buku ini. Beliau mendeskripsikan dedikasi luar biasa yang dilakukan oleh guru di Amerika. Berangkat pagi, pulang larut, serta tas kerja yang penuh dengan buku dan kertas adalah gambaran sehari-hari seorang guru di sana. Saking lelahnya, penulis pernah tergeletak di lantai dapur sesaat setelah sampai rumah. Istri beliau, Johana, yang berasal dari Finlandia sempat mengutarakan kecemasan terhadap kondisi suaminya. Johana menceritakan bahwa keadaan guru di Helsinki-Finlandia jauh berbeda dengan suaminya saat itu. Awalnya Timothy meragukan apa yang disampaikan istrinya, sampai pada akhirnya Timothy memutuskan untuk pindah ke Finlandia.

Teach Like Finland memuat tentang kondisi pembelajaran di Finlandia. Buku ini membagi fokus utama ke dalam

lima bab, yakni *Kesejahteraan, Rasa Dimiliki, Kemandirian, Penguasaan, dan Pola Pikir*. Pendidikan di Finlandia menitikberatkan kolaborasi antara siswa dan guru. Kolaborasi inilah yang menciptakan kenyamanan di antara kedua pihak. Kenyamanan tersebut menjadi fondasi untuk kebahagiaan dan efektifitas pembelajaran di kelas. Dari lima bab tersebut lahirlah 33 strategi untuk kelas yang menyenangkan ala orang Finlandia.

Buku setebal 197 halaman ini juga mengenalkan berbagai program pendidikan di Finlandia. Finlandia memiliki program pendidikan yang tidak hanya mementingkan nilai ujian formal, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Salah satu program pendidikan di Finlandia adalah KiVa. KiVa merupakan singkatan dari kata-kata Finlandia *kiusaamista vastaan* yang berarti melawan perisakan (*bullying*).

4.5 dari 5 adalah nilai yang menurut saya patut untuk diberikan kepada buku ini. *Teach Like Finland* cocok untuk dibaca semua kalangan, baik pengambil kebijakan, guru, orangtua, bahkan profesi lain. Buku ini menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hasil dari kolaborasi semua pihak. Terakhir, sudah siapkah kalian menelisik 33 resep dari ruang kelas di Finlandia? Selamat membaca.

PERAN INTEGRITAS

Organisasi Dalam Mendukung Integritas Individu

Teks Ervin Septian F. & Ridzky Aditya S., Pegawai pada Inspektorat Jenderal*



Ilustrasi
Dimach Putra

Integritas dan etika acapkali dianggap sebagai masalah oknum pegawai daripada tanggung jawab organisasi, dan ini terjadi di banyak sektor. Contohnya, kasus korupsi Enron Corporation dengan KAP Arthur Andersen-nya yang melibatkan unit pengendali internal atau kasus suap antar perusahaan multinasional besar Airbus dan Rolls Royce, yang ikut terjatuh dalam kasus korupsi PT Garuda Indonesia. Insitituti-institusi tersebut adalah institusi yang memiliki tools manajemen untuk mengendalikan risiko *fraud*. Namun, di sisi lain respon terhadap kasus korupsi relatif generik, menyatakan bahwa itu adalah murni perilaku oknum pelaku meskipun oknum tersebut berada di posisi pimpinan strategis.

Sebagian besar perusahaan menganggap masalah etika tidak terkait dengan manajemen perusahaan, namun murni ulah “*rogue employee*”. Namun demikian, masalah etika adalah

tanggung jawab manajemen (Paine, 1994). Praktik pelanggaran etika dan integritas hampir selalu melibatkan lingkungan yang mendukung, *tacit* dan kerjasama dengan pihak lain yang justru mencerminkan secara *de-facto* nilai-nilai yang dianut, perilaku, gestur, dan budaya dari perusahaan. Pada tahun 1992, sebuah perusahaan otomotif Sears Auto Center menetapkan target penjualan suku cadang yang tinggi yang memunculkan tekanan kepada pegawai. Dampaknya, ada upaya oknum pegawai memberikan pelayanan penjualan suku cadang yang tidak perlu kepada konsumen dengan biaya yang cukup besar. Pada akhirnya, justru Sears Auto Center dituntut ke pengadilan atas dugaan penipuan konsumen (Paine, 1994).

Lalu, bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Dari segi perangkat manajemen untuk memperkuat nilai integritas, Kemenkeu sudah memadai. Sebut saja implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan melalui KMK 312 tahun 2011, kode etik dan kode perilaku pegawai melalui PMK 190 tahun 2018, atau pengendalian gratifikasi melalui PMK 7 tahun 2017. Dari sisi peraturan sudah cukup memadai, lalu bagaimana dengan implementasi dan dampaknya di tingkat operasional?

Ketika organisasi menetapkan *values* dan standar perilaku, maka idealnya integritas pegawai selaras dengan organisasi. Namun, ada hal-hal mendasar yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, dilema integritas saat unit operasional menghadapi situasi untuk menjamu tamu dari unit lain atau “pusat”. Contoh lainnya, masih ada unit-unit operasional di daerah yang harus

mengakomodir kegiatan seremonial, baik dari arahan pimpinan atau unit eksternal lain, yang memunculkan tekanan bagi pegawai dalam penyediaan layanan yang tidak mudah dipenuhi secara akuntabel.

Dari dua contoh tersebut, bisa kita lihat ketidakselarasan antara nilai-nilai dan etika yang tertulis dengan pelaksanaan di tingkat operasional. Muncul asimetri informasi yang diterima pelaksana di lapangan yang menjadi dilema, ketika aturan yang sudah disepakati bersama, diwakili oleh jajaran pimpinan, kemudian dibenturkan dengan tuntutan kondisi di lapangan. Kemudian, muncul pertanyaan apakah Kementerian Keuangan mampu mengimplementasikan nilai dan peraturan yang disusun, terutama masalah integritas?

Terdapat lima elemen yang mempengaruhi kapasitas sebuah institusi publik agar bisa mencapai tujuannya, yaitu *action environment*, *institutional context*, *task network*, *organizations*, dan *human resources* (Grindle et al, 1997). Dilihat dari *institutional context*, terdapat pengaruh dari peraturan yang berlaku terhadap kapasitas institusi dalam mencapai tujuannya. Apakah ada peraturan yang tumpang tindih, tidak jelas, dan internalisasi peraturan yang kurang memadai. Dari sisi *organizations*, terdapat pengaruh gaya manajemen dan kepemimpinan terhadap kapasitas institusi.

Selain kapasitas organisasi, apakah faktor individu pegawai juga berpengaruh? Dalam konsep *fraud triangle*, ada tiga faktor penyebab individu berperilaku *fraud* yakni *pressure*, *opportunity*, dan

rationalization. Berkaca pada contoh di atas, kebijakan organisasi dapat memunculkan kondisi yang menekan pegawai berperilaku *fraud*. Selain itu, perilaku negatif pimpinan memunculkan rasionalisasi bagi pegawai berperilaku *fraud* dan sistem pengendalian yang tidak memadai, memunculkan kesempatan untuk berperilaku *fraud*.

Pelanggaran integritas dan etika bukanlah masalah individu, tetapi juga tanggung jawab organisasi. Oknum pegawai Sears Auto Center mungkin tidak akan “menipu” konsumen jika tidak ada tekanan perusahaan dalam target penjualan. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia mungkin tidak akan berperilaku *fraud* jika tidak melihat perilaku yang sama dari pimpinannya terdahulu. Keluhan kasubag umum di kantor pelayanan terkait jamuan tamu atau keluhan pimpinan satker vertikal terkait acara seremonial mungkin tidak akan ada jika peraturan dapat diimplementasikan dengan baik dan didukung jajaran pimpinan.

Upaya terbaik mencegah penyimpangan etika dan nilai adalah dengan membentuk organisasi yang mendorong integritas dan keteladanan (Paine, 1994). Implementasi kebijakan organisasi yang mendukung terciptanya lingkungan berintegritas dan keteladanan tidak hanya menunjukkan komitmen pimpinan, tetapi juga pegawai senior kepada nilai-nilai yang dianut organisasi. Keteladanan dari semua lini akan mengeliminasi risiko rasionalisasi perilaku tidak etis dari pegawai.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Covid 19 dan UMKM

Foto dan Teks Resha Aditya Pratama

Di tengah pandemi COVID-19, UMKM tidak luput terkena imbasnya. Tidak hanya penurunan omzet akibat pembatasan sosial, namun juga terganggunya penyediaan bahan produksi dan kesulitan permodalan sehingga berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah memberi stimulus agar dapat membantu sektor andalan ini dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor UMKM sebesar Rp123 triliun. Pemerintah menciptakan dukungan ekosistem ekonomi agar UMKM dapat bertahan dalam menghadapi pandemi. Jenis bantuan yang diberikan juga beragam untuk mengatasi berbagai kesulitan. Mulai dari subsidi bunga pinjaman sebesar Rp13,43 triliun, Penempatan dana pemerintah diperbankan dalam rangka restrukturisasi UMKM sebesar Rp66,99 triliun, Penjaminan Kredit UMKM Rp3,21 triliun, insentif PPh sebesar Rp1,08 triliun, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB UMKM Rp1,29 triliun, Bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro Rp28,82 triliun hingga pendampingan strategi pemasaran melalui online marketing. Per November 2020, realisasi PEN Sektor UMKM sebesar Rp95,62 triliun atau 83,28% dari pagu. Tingkat realisasi yang cukup tinggi ini menunjukkan keseriusan upaya pemerintah untuk mendukung UMKM.



RAPID TEST

Laporan Keuangan Pemerintah

Teks Teks Fitra Riadian, pegawai Kanwil DJPb Kemenkeu Prov. Maluku Utara*

Krisis pandemi tak hanya berimbas pada kesehatan dan ekonomi tapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Pada TA 2019 jumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari 81 K/L menjadi 84 K/L dari total 87 K/L. Peningkatan ini juga senada dengan perbaikan laporan keuangan pemda di mana 486 pemda (89,7 persen) dari total 542 pemda mendapat opini WTP. Pada TA 2020 penyusunan laporan keuangan pemerintah menghadapi tantangan baru yakni bagaimana mempertanggungjawabkan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) secara tepat sehingga tidak mengancam pencapaian opini Laporan Keuangan K/L (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Tantangan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) besaran nominal anggaran PEN yang mencapai Rp695,2 triliun; (2) program kebijakan yang adaptif dengan realitas perkembangan pandemi dan imbasnya di masyarakat; dan (3) fleksibilitas pengelolaan keuangan dan diskresi hukum yang

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU 2/2020). Hal-hal tersebut perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak melemahkan kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu, sebagaimana *rapid test* dilakukan sebagai penapisan awal dalam upaya mendeteksi virus COVID-19, konsep serupa dapat pula diterapkan pada laporan keuangan pemerintah. Langkah-langkah *rapid test* laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

Apakah peraturan telah dibuat sampai pada tataran teknis?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan program penanganan pandemi COVID-19 beragam dan adaptif sehingga sangat menantang baik dari sisi *design policy*, tata kelola, maupun implementasinya. Bagaimana agar berjalan baik namun tetap responsif dan cepat. Banyaknya program baru memerlukan aturan baru dari level kebijakan hingga level teknis. Peraturan yang sudah jadi pun kadang perlu diubah bila terdapat permasalahan dalam implementasinya.

Apakah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah menyesuaikan perannya?

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian & Kemaritiman, Selamat Simanullang menyatakan peran APIP harus berubah, tidak hanya sebagai internal auditor atau pengawas. APIP harus melakukan pendampingan manajemen. Artinya, APIP hadir dalam siklus pengelolaan keuangan, dari perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban (pelaporan keuangan). Peran ini harus dilaksanakan sejak dini sehingga setiap tahap

selalu terjaga dan pemeriksaan tidak menumpuk di belakang hari. Libatkan APIP saat merumuskan kebijakan program baru sehingga unsur-unsur sistem pengendalian intern untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi dapat terakomodir.

Apakah mitigasi risiko hukum telah dilakukan?

Dalam Pasal 27 UU 2/2020 dinyatakan bahwa: (1) seluruh biaya adalah untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan kerugian negara; (2) para pejabat/pegawai tidak dapat dituntut perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan; dan (3) segala tindakan termasuk keputusan bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara, tetap wajib dilakukan mitigasi risiko hukum melalui sosialisasi dan pendidikan hukum. Namun demikian, Jaksa Agung Muda Perdatun, Feri Wibisono menyatakan itikad baik adalah tidak adanya kepalsuan (fakta

dan dokumen) dan tidak adanya *fraud*. Diskresi hukum tetap ada batasannya, yaitu agar dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Jika belum lengkap, wajib membuat peraturan tersebut. Feri juga menekankan pentingnya menghindari penyalahgunaan wewenang. Risiko yang bisa muncul adalah di area pendistribusian dana, penempatan dana, pinjaman daerah, dan pinjaman korporasi. Semuanya harus digunakan secara *proper* sesuai peruntukannya agar tidak masuk kategori perbuatan yang bersifat melawan hukum.

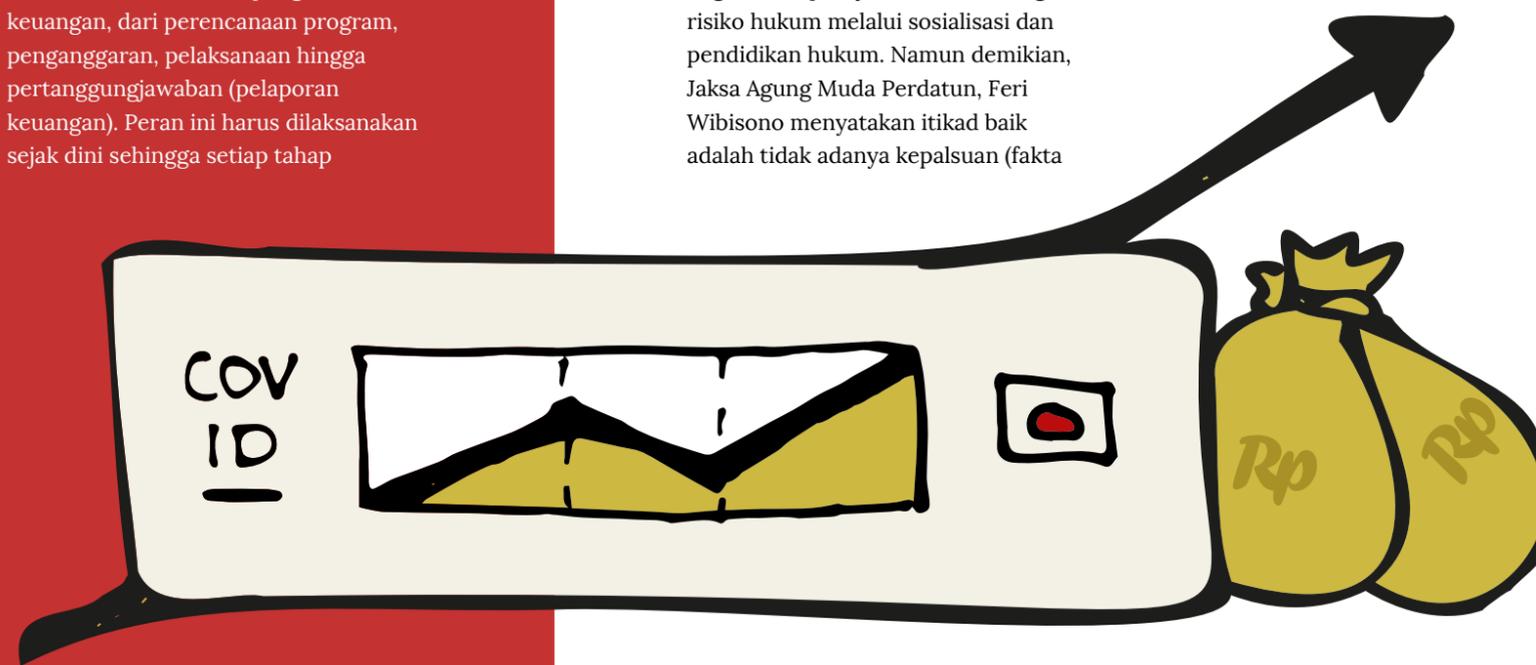
Apakah terdapat sistem teknologi informasi (IT) yang dapat menghasilkan data yang mumpuni?

Besarnya anggaran dan dinamisnya program memerlukan *tools* pengawasan input output baik oleh pemerintah maupun BPK. Termasuk *cross checking*

data antarlembaga yang menyalurkan bantuan pemerintah seperti BI, LPS dan BUMN/D untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Data juga diperlukan untuk pengungkapan penanganan COVID-19 dalam laporan keuangan. UU 2/2020 mengamanatkan penjelasan penggunaan anggaran, kebijakan keuangan negara, dan langkah-langkahnya seperti proses *refocusing* anggaran dan *intake/output* yang dihasilkan. Di samping membantu penelusuran kewajaran penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan, kodefikasi akun khusus COVID-19 juga dapat digunakan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan untuk melihat sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program.

Bila “reaktif”, bagaimana?

Bila jawaban pertanyaan di atas adalah “reaktif” berarti mengindikasikan akan terjadi kesulitan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Segera ambil langkah mitigasi. Pertama, lakukan sinergi antara APIP, BPK, Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum dalam fungsi konsultasi, audit bersama dan berbagi informasi untuk percepatan pengendalian *fraud*. Kedua, selenggarakan sosialisasi risiko pidana/perdata kepada para operator dan pejabat pelaksana. Terakhir, ciptakan sistem informasi yang dapat menampilkan data-data yang akurat.



*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Mengubah Sampah menjadi Berkah

Teks CS. Purwowidhu

Cuaca masih terik meskipun telah lewat tengah hari kala itu di Banjar Cagaan Kaja, Desa Pejeng, Gianyar, Bali. Beberapa warga membawa karung sampah rumah tangga hasil pilahan mereka. Sementara sekelompok muda-mudi nampak bersemangat, ada yang melayani warga yang menyeter sampah, ada pula yang menyortir sampah sambil bersenda gurau satu sama lain. Inilah rutinitas yang tiap minggu dijumpai di bank sampah kelolaan Griya Luhu yang didirikan oleh Ida Bagus Mandhara Brasika atau akrab disapa Nara, seorang *climate scientist* dan aktivis lingkungan. Tak pernah terbayang sebelumnya oleh Nara bahwa secercah usaha yang bermula dari keresahan hati terhadap perusakan lingkungan berujung pada besarnya pengaruh yang ia berikan kepada penduduk lokal Gianyar, Bali, dalam mengubah pola pikir tentang pengelolaan sampah.

Passion terhadap isu lingkungan

Kepedulian Nara terhadap isu lingkungan sudah tertanam semenjak mengenyam pendidikan S1. Menjelang akhir masa perkuliahan ia belajar mengenai perubahan iklim, saat itulah ia menyadari kerusakan lingkungan

sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan isu iklim. “Penyebab utamanya adalah manusia,” ucap alumnus Meteorologi ITB ini. Nara melanjutkan *passion*nya untuk berkecimpung di bidang lingkungan dengan menjadi PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli lalu melanjutkan studi S2 pada tahun 2016 melalui beasiswa LPDP di jurusan Teknologi Lingkungan, Imperial College London, Inggris.

Sepulangnya ke Indonesia pada tahun 2017, Nara terenyuh dengan maraknya isu sampah di Bali. Tak pernah terbersit sedikitpun keengganan dalam benak penyandang gelar master of science dari universitas ternama di dunia ini untuk bergelut dengan hal yang sesungguhnya dekat namun paling dijauhi banyak orang, yakni sampah. Bagi Nara mengurus sampah bukan ihwal mencari profit melainkan menemukan kebahagiaan hidup tatkala ia mendapati dirinya berfaedah untuk orang lain dan lingkungan. Nara pun memutuskan untuk terjun langsung mengelola sampah. “Saya merasa kalau nggak ada orang-orang lokal yang mau gerak, isu sampah di Bali ini akan terus berlangsung,” ujar penerima penghargaan US Professional Fellow dari US Department of States tersebut.

Merintis bank sampah

Diawali niat dan tekad untuk memulihkan Bali dari gelimang sampah, Nara pun bergerak dari desa. “Kalau kota selalu di bawah *spotlight*, gampang sekali mencari *funding*, sedangkan desa tidak banyak terekspose sementara masalahnya ada di sana,” papar anggota tim perumus Pergub 97/2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai itu. Pada akhir 2017 Nara merintis komunitas pengelolaan sampah dari daerahnya sendiri di Gianyar, Bali. Nara mengumpulkan teman-teman lokalnya untuk bergerak di desa masing-masing. Mereka mulai dengan kampanye untuk tidak memakai sedotan plastik dan sebagainya sampai akhirnya berkembang dengan membuka bank sampah. Implementasi bank sampah tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang terkirim di tempat pembuangan akhir namun juga dapat menjadi alternatif tambahan pendapatan untuk warga. Awal mula menjalankan bank sampah, Nara memakai dana pribadinya sebagai modal. “Pada 1-2 tahun pertama saya sisihkan gaji saya di PNS untuk itu,” kenang pria yang setahun belakangan ini telah beralih profesi menjadi dosen negeri di jurusan Ilmu Kelautan Universitas Udayana.

Langkah utama yang dilakukan Nara ketika merintis bank sampah yaitu mengubah paradigma masyarakat mengenai sampah, dari yang sebelumnya berpola angkut-buang menjadi pilah-memilah sampah. Mengampanyekan pemilahan sampah terbukti efektif melalui contoh tindakan nyata di tengah masyarakat seperti yang dilakukan Nara. Masa-masa awal menjalankan bank sampah, tak jarang Nara menghadapi pertentangan dari warga desa. Mereka membawa sampah-sampah yang kotor, yang tidak terpilah dengan baik. Alih-alih bersiteru, Nara dengan sabar memilahkan sampah-sampah para warga desa di balai desa. Kegigihan Nara meluluhkan hati warga desa dan menggugah kesadaran mereka. Tak lama berselang para warga akhirnya menyatakan dukungan mereka terhadap sistem manajemen pengelolaan sampah yang dirintisnya.

“Bahkan tetua desa yang sudah berumur 70 tahun pun bisa mengubah paradigma kebiasaan mengelola sampah,” ungkap peraih Pemuda Pelopor di bidang lingkungan tahun 2019 dari Pemkab Gianyar itu. Sejak saat itu, para warga dengan sukarela memilah sendiri sampah mereka sebelum dibawa ke bank sampah. “Sekarang saya dengan para warga desa jadi seperti keluarga,” lanjutnya. Semangat kekeluargaan yang terjalin ini juga memudahkan Nara dalam menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada warga setempat.

Griya Luhu

Komunitas bank sampah rintisan Nara bertumbuh menjadi Griya Luhu, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengembangan sistem pengelolaan sampah di pedesaan. Kegiatan yang dilakukan berkisar pada edukasi lingkungan, daur ulang sampah, dan membangun bank sampah. Namun sejak krisis pandemi Griya Luhu fokus pada pengembangan *mobile apps* bank sampah. Bank sampah Griya Luhu



Ida Bagus Mandhara Brasika, Dosen Ilmu Kelautan Univ. Udayana dan founder Griya Luhu

Foto Dok. Pribadi



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

tersebar di tiga desa (Cagaan Kaja, Lebih, dan beng) dan hingga saat ini melayani 300–500 nasabah. Dalam satu minggu, masing-masing bank sampah rata-rata bisa menghasilkan 400 - 700 Kg sampah. Sampah plastik yang dikumpulkan akan diolah kembali menjadi biji plastik. “Pengolahannya ada yang kami kirim ke Denpasar, Buleleng, dan Jawa,” jelasnya.

Nara bersyukur kemajuan Griya Luhu yang dicapai hingga saat ini. Perkembangan Griya Luhu yang semakin matang memungkinkan tercapainya profit melalui hasil jual-beli sampah. Profit itulah yang kemudian dipakai untuk biaya operasional. Melalui perjuangan yang tak mengenal lelah, saat ini Griya Luhu telah berkembang sebagai *socio-techno enterprise*. “Jadi sekarang kita punya *mobile apps* sendiri untuk *digital waste management*. Kita juga punya gudang, kendaraan, dan sumber daya yang membantu kita memilah sampah,” tutur penerima Mata Garuda Prize 2020 kategori sains dan

teknologi tersebut. Nara saat ini juga sedang berfokus memperluas jangkauan bank sampah Griya Luhu. Nara mengaku ada tiga desa yang akan bergabung di akhir tahun ini.

Live bigger than yourself

Nara berpesan agar anak-anak muda Indonesia yang berencana melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar diterima berkuliah di universitas ternama dunia. “Seharusnya pendidikan di luar negeri itu bukan *goal*-nya, tapi itu harusnya menjadi jalan untuk memberi kontribusi yang lebih besar lagi bagi Indonesia,” lugasnya. Nara berharap agar para *awardee* LPDP sepulang dari menyelesaikan studi baik di dalam maupun luar negeri, dapat membaktikan diri di daerah asal masing-masing. “Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di kampung halaman. Daerah-daerah dan desa-desa ini semua membutuhkan kita,” pungkasnya.

LULUH KARENA PESONA MENYELURUH SUKUH

Tekes dan Foto Dimach Putra

Terletak di lereng Gunung Lawu Jawa Tengah, Candi Sukuh adalah salah satu peninggalan Wangsa Majapahit yang dibangun di penghujung masa kejayaannya. Saat itu, pengaruh Hindu telah melemah seiring makin berkembangnya Islam di tanah Jawa. Menurut ahli, hal itu berpengaruh pada gaya arsitektur candi yang tak lagi berkiblat pada bangunan peribadatan serupa di India. Bentuk punden berundak khas pemujaan nenek moyang kita terlihat kembali diterapkan pada lansekap kompleks bangunan ini.

Areal candi ini terbagi menjadi tiga teras. Masing-masing teras dihubungkan dengan sebuah gerbang. Di teras teratas terdapat bangunan candi induk. Tak hanya unik karena penerapan punden berundak, bangunan utama yang berbentuk trapesium ini menjadi salah satu daya tarik utama Candi Sukuh. Banyak orang beranggapan bahwa candi ini lebih mirip piramida di Amerika Selatan dibanding candi bercorak Hindu-Jawa.

Berkenalan dengan simbol kesuburan

Butuh satu jam perjalanan dari Kota Solo menuju Karanganyar, kabupaten di Jawa Tengah, tempat candi ini berada. Perjalanannya berliku khas daerah pegunungan. Sebelum sampai di lokasi, mobil kami harus melewati tanjakan yang cukup curam. Setelah memarkir kendaraan, kami bergegas menuju ke loket penjualan tiket di seberang areal candi. Setelah membayar tiket seharga 10 ribu Rupiah per orang, pihak pengelola meminjamkan sehelai kain batik untuk menutupi daerah pinggang hingga kaki kami selama berkeliling di sekitar candi.

Memasuki areal candi, pandangan saya langsung terpatri pada gerbang masuk menjulang dengan susunan anak tangga yang cukup curam. Bangunan ini bertipe gapura paduraksa, memiliki atap, yang seluruhnya tersusun dari batuan andesit merah. Pada ambang atas pintu tampak berhias relief kala, sang raksasa penolak bala. Gerbang masuk ke teras pertama ini disebut “*Gapura Buta Anahut Buntut* (raksasa menggigit ekor)” dengan

candrasengkala (sandi angka) yang menyimbolkan tahun pendirian candi pada 1359 Saka atau 1437 Masehi.

Meskipun sudah ditutup sebagai akses masuk umum, kita tetap diperbolehkan memanjat tangga gapura tersebut. Dari ujung anak tangga teratas, saya melongok ke lantai gerbang yang terdapat relief kelamin pria dan wanita. Relief ini digambarkan cukup eksplisit dalam posisi hendak penetrasi. Banyak yang mengartikan bahwa relief tersebut merupakan lambang dan memiliki tuah untuk kesuburan. Representasi lingga dan yoni ini juga bisa dimaknai sedikit berbeda. Bahwa manusia hendaknya selalu ingat dengan asal muasalnya yang sederhana, yakni dari hasil bertemunya sel telur dan nutfah dari ibu-bapaknya.

Garudeya dan lambang negara

Masyarakat sekitar kerap menyebut candi ini dengan sebutan “candi *saru* (tidak sopan)”. Ihwai pemberian julukan ini tak lain karena banyaknya patung dan relief yang digambarkan polos dan terkesan



vulgar bagi sebagian orang. Namun, kekhasan Candi Sukuh tak hanya terdapat pada erotisme pada ornamen pelengkap bangunannya saja. Candi ini merupakan satu dari dua candi yang menceritakan lengkap kisah Garudeya. Lambang negara kita, Garuda, konon meminjam filosofi dari epos tersebut. Di sini kita bisa melihat relief dan patung yang menceritakan makhluk mitologi ini dalam berbagai pose dan bentuk, mulai dari pahatan pada dinding

gerbang utama, lalu tersebar hingga area candi induk.

Garudeya merupakan mitos kepercayaan masyarakat Hindu-Jawa kuno. Kisah ini mengandung pesan moral tentang ruwatan atau perjuangan menuju kebebasan. Garuda adalah anak Resi Kasyapa dengan salah satu istrinya, Winata. Istri lainnya, Kadru, karena rasa iri menjadikan Winata budak dengan cara yang keji. Sang anak yang ingin menunjukkan bakti pada ibunya rela melewati pertarungan panjang melawan Naga, anak dari Kadru. Sampai akhirnya, Garuda rela berkompromi dengan memenuhi permintaan Naga untuk membawakannya “Tirta Suci Amertha Sari”, air keabadian.

Garuda lalu berangkat dalam pengembaraannya mencari air suci, hingga akhirnya ia bertemu Wisnu. Sang Dewa berjanji memberikan air tersebut dengan syarat Garuda bersedia menjadi tunggangannya. Jika pernah mendengar “*Garuda Wisnu Kencana*”, kisah inilah cikal bakalnya. Perjuangan anak yang berbakti ini akhirnya mampu memberi kebebasan bagi ibunya yang sangat dicintai dan dihormatinya. Dalam tataran kebangsaan, cerita ini dapat dimaknai sebagai bakti putra-putri bangsa yang berjuang demi kemerdekaan dari belenggu imperialisme dan kolonialisme selama beratus tahun. Setidaknya itu yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Mereka tidak serampangan memilih lambang negara yang cukup merepresentasikan nilai, moral dan filosofi mendalam, serta tak acuh pada nilai historis yang diwariskan nenek moyang kita.

Paripurna menikmati keindahan-Nya

Candi Sukuh yang terletak pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Saat menghirup udara di sana, rasanya masih segar dan bersih. Suhunya pun masih terbilang sejuk. Sesekali angin bertiup sepoi-sepoi menggerakkan ranting-ranting cemara gunung yang ditanam mengelilingi areal candi. Berkas

sinar mentari seakan terfiltrasi menembus jarum-jarum daun cemara yang menari mengikuti tiupan angin. Kicau burung bersahut-sahutan dengan dengungan tonggeret menambah syahdu suasana alam. Lingkungan sekitar candi ini juga sangat asri, bagian belakangnya berbatasan dengan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I.

Salah satu cara terbaik memandang sajian alam dan peninggalan bersejarah ini secara paripurna adalah dari atas candi induk. Untuk menikmatinya, beberapa anak tangga yang sempit dan curam telah menanti untuk didaki. Perlu sedikit usaha dan kesabaran untuk mencapai puncak, karena harus bergantian untuk naik dan turunnya. Bagian atas candi ini hanyalah permukaan rata menyerupai panggung. Ada bagian yang berceruk, tempat dulunya phallus/lingga setinggi 2 meter berdiri tegak di puncak candi. Saat ini benda tersebut disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Dari atas “panggung trapesium” setinggi 6 meter ini kita bisa melihat keseluruhan areal candi. Terbentang luas di depannya adalah pemandangan pedesaan di kaki Gunung Lawu.

Duduk termenung menikmati visual yang indah sangatlah menyenangkan. Rasanya saya tak ingin segera mengakhiri dan ingin berlama-lama di sana. Apalagi pengunjung tempat ini bisa dihitung dengan jari. Tak seperti objek wisata lainnya di sekitar yang selalu ramai pengunjung, seperti Kebun Teh Kemuning, Candi Cetha, dan Tawangmangu, jika beruntung seperti kami, tempat ini serasa telah anda sewa secara privat. Tak ada pengunjung lain di sana. Saat saya memejamkan mata sejenak, yang terdengar hanya suara nafas kami berpadu dengan musik alami dari lingkungan sekitar. Seketika ketenangan merayap di sekujur tubuh. Sejenak stres dari rutinitas sehari-hari yang membelenggu pun sirna.

Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email mediakeuangan@kemenkeu.go.id sertakan nama, alamat, dan no telepon.

my goals

Evaluasi Resolusi Keuangan

Teks Resha Adhitya P | Foto Istock

Masih ingatkah kamu dengan resolusi yang dibuat di awal tahun? Tidak sedikit dari kalian yang membuat beberapa resolusi pribadi tentang apa saja yang ingin dicapai di tahun 2020 ini. Salah satu resolusi yang biasa disusun adalah resolusi keuangan. Beberapa contoh targetnya adalah seperti berjanji untuk disiplin menabung atau berinvestasi rutin setiap bulan, membayar lunas cicilan, tidak menambah utang, dapat membeli aset baru, dan lain sebagainya.

Mengingat sudah akhir tahun, maka sebaiknya lakukanlah revaluasi terhadap resolusi keuangan yang sudah menjadi komitmenmu di awal tahun. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana?

Jika sudah, apakah kamu akan tetap berkomitmen dengan resolusi keuangan yang sama untuk tahun depan? Jika belum, tuliskan alasan mengapa kamu belum melakukannya. Perlu juga kamu identifikasi hambatanmu sehingga kamu dapat menemukan solusinya.

Jika kamu belum melakukan resolusi sama sekali maka temukan akar permasalahannya. Apakah karena kamu merasa kurang disiplin untuk melakukan perubahan finansial sehingga kamu terus saja menjadi seorang yang konsumtif? Perlu disadari bahwa ketika kamu terus menunda untuk merencanakan keuangan, maka tahun 2020 akan berakhir dengan kamu tidak mengalami perubahan finansial sama sekali. Pastinya kamu tidak ingin hal ini terjadi.

Bersama pasanganmu, mulailah untuk mendiskusikan kondisi keuanganmu saat ini dan merencanakan untuk menatanya. Setiap orang akan menghadapi tantangan mengelola keuangan yang berbeda-beda. Kamulah yang harus menyadari dan mengakui terlebih dahulu jika ada masalah. Jangan biarkan persoalan berlarut-larut dan menunda-nunda untuk memperbaiki manajemen keuanganmu. Konsultasikan kepada ahli jika kamu merasa belum dapat melakukan perencanaan keuangan sendiri. Banyaklah belajar dan menambah ilmu sedikit demi sedikit mengenai keuangan. Percayalah, waktu yang kamu luangkan untuk belajar akan menjadi sangat berharga bagi masa depanmu dan keluarga.

Mas Praim

"Rencana Gatot (Gagal Total)"

Cerita : Yani Kurnia A. Gambar : Ditto Novenska





HARI GUNUNG INTERNASIONAL
11 DESEMBER 2020